

Wahyu Nugroho



Pendidikan Kewarganegaraan



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

3 Untuk
Kelas IX
SMP/MTs

Wahyu Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan



3 Untuk
Kelas IX
SMP/MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Kewarganegaraan

Jilid 3 untuk Kelas IX SMP

Penulis

Drs. Wahyu Nugroho

Editor

Drs. Tri Djoko Santosa
S.R. Dwi Kadarsih, S.Pd.
Rosmalia Nurul H., S.E.
Rohmi Fauziah, S.Ag.

Perancang Kulit

Zainal Abidin

Perancang Tata Letak

Yulianto

Penata Letak

Luluk Nurul Choiriah

Ilustrator

Agastio Safari

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi oleh Undang-undang

370.114 7

PED

WAHYU Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs Kelas IX
/ penulis Sugiharso...[et al] ; editor Wahyu Muhammadi ; ilustrasi
Joemady, Sekar . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
viii, 138 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 137-138

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)

ISBN 978-979-068-164-4

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Wahyu Muhammadi III. Joemady IV. Sekar
V. Sugiharso

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Pustaka Bengawan, CV

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh

Kata Sambutan


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.


Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.





Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan



Kata Pengantar

Kalian telah duduk di kelas IX SMP. Banyak hal baru yang dapat kalian temui, misalnya suasana dan lingkungan yang baru. Kalian pasti senang menemui hal-hal baru. Dalam bergaul di lingkungan yang baru, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Semua itu dapat kalian pelajari melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, kalian diharapkan dapat menjadi warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kualitas buku yang digunakan.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini, kami susun dalam tiga jilid.

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk kelas VII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas VIII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk kelas IX SMP/MTs

Buku ini disajikan dengan metode yang praktis dan sistematis serta dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang disampaikan, buku ini dilengkapi dengan Uji Kompetensi yang berisi tugas-tugas pada setiap akhir subbab. Pelatihan pada setiap akhir bab dimaksudkan untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.



Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Ulangan Semester sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai kompetensi dasar setiap semester.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memperoleh kompetensi di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

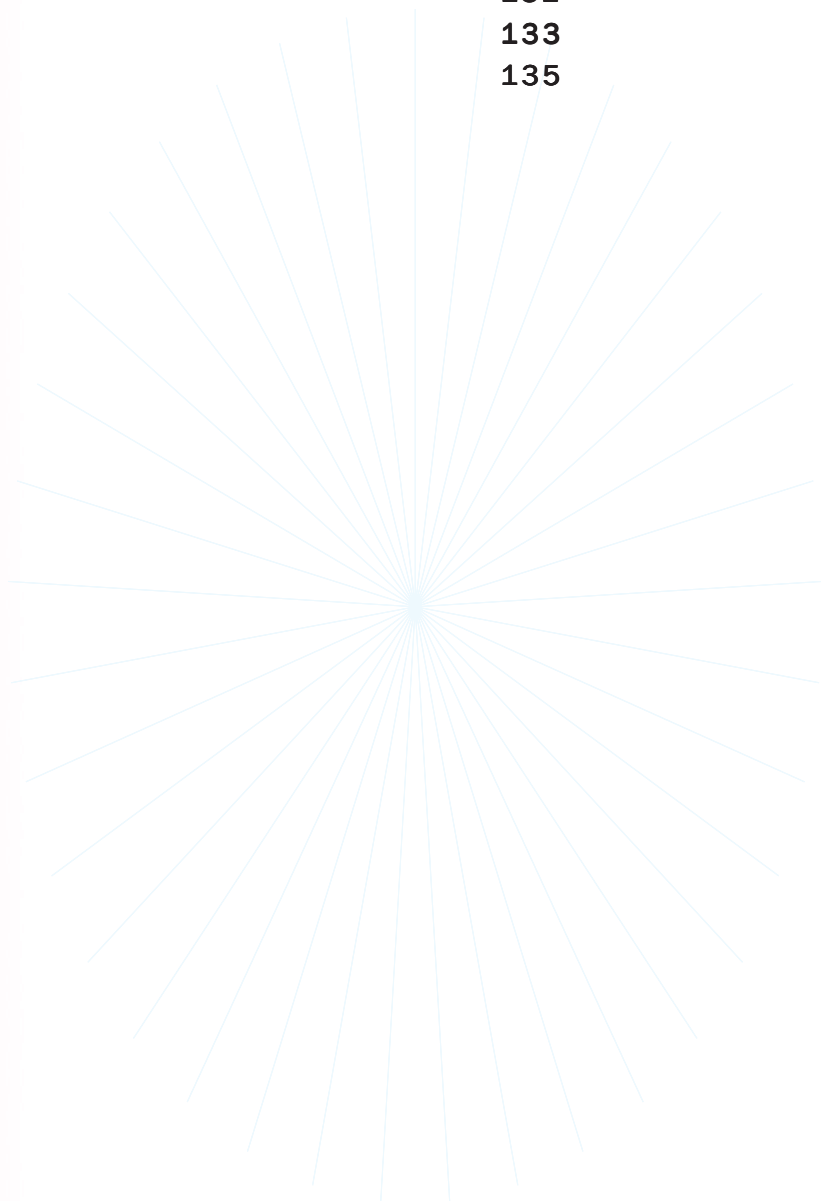
Penulis



Daftar Isi

Kata Sambutan		iii
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vii
Bab 1	Pembelaan terhadap Negara	1
	A. Hakikat Negara	3
	B. Arti Penting Usaha Pembelaan Negara	14
	C. Usaha Pembelaan Negara	18
	D. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungan	24
Bab 2	Otonomi Daerah	37
	A. Hakikat Otonomi Daerah	39
	B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah	46
	C. Partisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	59
Ulangan Semester I		69
Bab 3	Dampak Globalisasi	71
	A. Pengertian dan Arti Penting Globalisasi	73
	B. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi	79
	C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	86
	D. Sikap terhadap Dampak Globalisasi	94
Bab 4	Prestasi Diri	107
	A. Potensi Diri untuk Berprestasi	109
	B. Sikap Kompetitif	118
	C. Partisipasi dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi diri	

Ulangan Semester II	121
Glosarium	131
Indeks	133
Daftar Pustaka	135



Bab 1

Pembelaan terhadap Negara



Regu bulu tangkis Indonesia berhasil mempertahankan Piala Thomas. Dalam perjuangannya hingga final, regu bulu tangkis Indonesia memiliki satu tekad, yaitu mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan tekad itu, para pemain dapat mengalahkan lawan-lawannya. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Itulah wujud salah satu dari usaha bela negara.

Pendahuluan

Selamat jumpa dengan bab pertama ini!

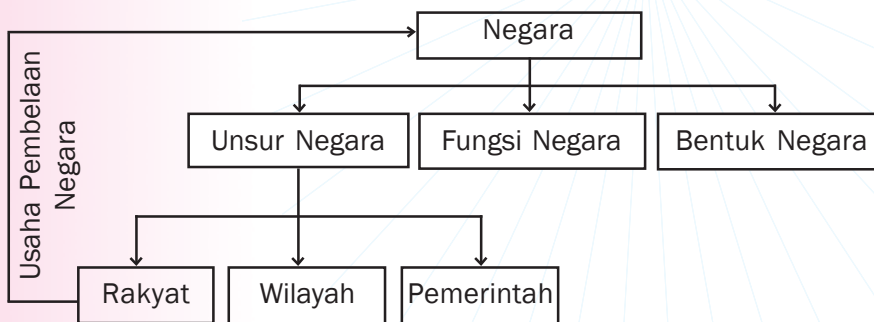
Dalam bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang pembelaan terhadap negara, yang diawali dengan pembahasan tentang hakikat negara, arti penting usaha pembelaan negara, usaha-usaha pembelaan negara, serta partisipasi dalam usaha pembelaan negara baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Tahukah kalian maksud pembelaan terhadap negara, usaha-usaha pembelaan negara, serta bentuk partisipasinya? Dengan mempelajari bab ini kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang hakikat negara, arti penting usaha pembelaan negara, usaha-usaha pembelaan negara, dan partisipasi dalam usaha pembelaan negara.

Setiap kegiatan belajar dalam bab ini dilengkapi dengan soal-soal yang bertujuan untuk mengulas kembali tentang pemahaman materi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam bab ini juga kami lengkapi dengan peta konsep untuk memperjelas materi sehingga memudahkan kalian untuk mempelajarinya.

Peta Konsep



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi dalam bab ini dibagi menjadi empat subbab.

Subbab A Hakikat Negara

Subbab B Arti Penting Usaha Pembelaan Negara

Subbab C Usaha Pembelaan Negara

Subbab D Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara

Pelajarilah bab ini secara bertahap, kegiatan demi kegiatan dan kerjakan pula tugas-tugas dalam setiap kegiatan. Dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut, kalian dapat menilai kemampuan sendiri berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari.

A. Hakikat Negara

Dalam kehidupan masyarakat bangsa, muncul berbagai masalah akibat beragamnya kepentingan. Untuk itu, diperlukan organisasi yang didukung oleh seluruh bangsa untuk mengelola berbagai kepentingan. Organisasi yang dimaksud dikenal dengan sebutan *negara*.

Apakah yang dimaksud dengan negara? Untuk lebih memahami tentang negara, simaklah pembahasan berikut.

1. Pengertian Negara

Kata negara berasal dari bahasa Sanskerta *negari* atau *nagara* yang berarti kota. Pengertian negara menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut **Roger H Soltau**, negara merupakan alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
- b. Menurut **Harold J. Laski**, negara merupakan suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat.
- c. Menurut **Max Weber**, negara sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.
- d. Menurut **Jean Bodin**, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat.
- e. Menurut **Mr. Soenarko**, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Dari segi peristilahan (terminologi), negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Setelah memahami pengertian negara, kalian perlu mengetahui unsur-unsur negara. Untuk itu, simaklah uraian berikut!

2. Unsur-Unsur Negara

Ada tiga unsur pokok terbentuknya negara, yaitu rakyat, wilayah negara, dan pemerintahan yang berdaulat.

a. Rakyat

Rakyat adalah sekumpulan manusia yang menghuni negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Rakyat suatu negara dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan tempat negara bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Penduduk dibedakan atas penduduk warga negara dengan penduduk bukan warga negara.

b. Wilayah Negara

Wilayah dimaksudkan sebagai daerah kekuasaan suatu negara, baik darat, laut, maupun udara. Setiap negara menduduki tempat tertentu dan memiliki batas tertentu pula.

Batas wilayah suatu negara dapat ditentukan melalui

- 1) perjanjian dengan negara yang berbatasan;
- 2) keadaan alam seperti danau, pegunungan, lembah, sungai, dan laut secara alami.

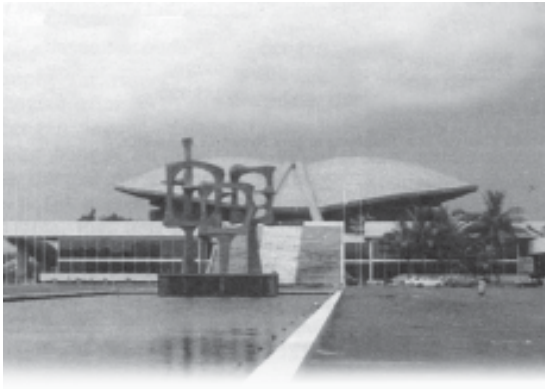
Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, bukan hanya tanah atau daratan, tetapi juga lautan di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas.

- 1) Pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden yang dibentuk oleh wakil presiden dan menteri-menteri.
- 2) Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR. Pemerintah ini merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.



Sumber: www.dpr.go.id.

Gambar 1.1 Di gedung inilah para wakil rakyat menjalankan tugasnya sebagai alat kelengkapan negara.

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa campur tangan dari bangsa atau negara lain. Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain.

Rakyat, wilayah negara, dan pemerintahan yang berdaulat termasuk unsur konstitutif dalam pembentukan negara. Selain unsur konstitutif, terbentuknya suatu negara juga berdasarkan unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *pengakuan de facto* dan *pengakuan de jure*.

a. Pengakuan *de facto*

Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (faktual). Misalnya, secara *de facto* Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.



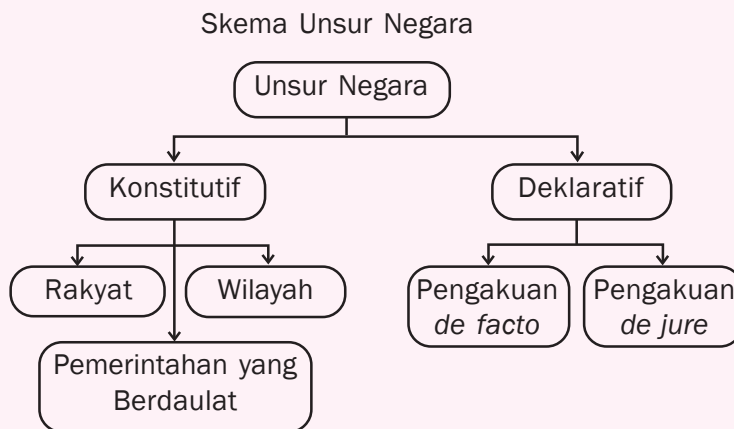
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.2 Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara *de facto* sudah diakui sebagai negara.

b. Pengakuan *de jure*

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan *de jure*, negara baru itu mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan *de jure* bangsa Indonesia sejak 18 Agustus 1945, pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif (KNIP) sebelum terbentuknya DPR/MPR.

Untuk memudahkan memahami pembahasan unsur negara dapat digambarkan skema sebagai berikut.



3. Asal Mula Terjadinya Negara

Ada dua sudut pandang mengenai terjadinya negara, yaitu berdasarkan kenyataan dan berdasarkan teoretis.

a. Berdasarkan Kenyataan

Menurut pandangan ini, negara di dunia terbentuk karena melalui proses, seperti penaklukan, peleburan (fusi), pemecahan, pemisahan diri, perjuangan, penyerahan/pemberian, dan pendudukan wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

1) Penaklukan

Penaklukan (*occupatie*) berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak kulit hitam yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.

2) Peleburan

Peleburan (*fusi*) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.

3) Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, Yugoslavia terpecah menjadi Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi Ceko dan Slovakia.

4) Pemisahan diri

Pemisahan diri adalah memisahkannya suatu bagian wilayah negara sehingga terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada. Misalnya, India kemudian terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh.

5) Perjuangan

Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri. Misalnya, Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan negara di Asia dan Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.

6) Penyerahan

Penyerahan adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahnya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo yang dimerdekakan oleh Prancis.

7) Pendudukan

Pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daerah Eropa. Australia dimerdekakan oleh Inggris tahun 1901.

b. Berdasarkan Teoretis

Terjadinya negara secara teoretis antara lain sebagai berikut.

1) Teori hukum alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, yaitu masa **Plato** dan **Aristoteles**. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

2) Teori ketuhanan

Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu Islam dan Kristen. Dengan demikian, teori ini dipengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, negara terjadi karena kehendak Tuhan dan didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan serta terjadi atas kehendak Tuhan. Penganjur teori ini, antara lain **Freiderich Julius Stahl**, **Thomas Aquinas**, dan **Agustinus**.

3) Teori perjanjian

Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad pencerahan. Mereka adalah **Thomas Hobbes**, **John Locke**, **JJ. Rousseau**, dan **Montesquieu**.

4. Fungsi dan Tujuan Negara

Setiap negara memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas-tugas yang perlu dilakukan. Fungsi menggambarkan adanya aktivitas, gerak, dan pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan menunjukkan suatu sasaran atau target yang hendak dicapai oleh negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara melaksanakan fungsi atau tugas-tugasnya. Dengan demikian, antara fungsi dan tujuan negara saling berkaitan.

a. Fungsi Negara

Apabila kita kembali pada teori bernegara, pada dasarnya negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik selaku pribadi maupun kelompok. Dengan hidup bernegara, diharapkan keinginan dan kebutuhan hidup manusia akan semakin mudah dan efektif.

Setiap negara yang berbeda-beda ideologinya akan menyelenggarakan fungsi negara. Fungsi negara yang mutlak perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Pelaksanaan penertiban

Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melakukan fungsi penertiban. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai stabilisator.

2) Kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting. Negara harus dapat menyejahterakan rakyatnya.



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 1.3 TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi untuk menjaga ancaman dari luar.

3) Pengusahaan sistem pertahanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan ancaman atau serangan dari luar. Untuk itu, negara dilengkapi alat-alat pertahanan.

4) Penegakan keadilan

Penegakan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan badan pengadilan.

b. Tujuan Negara

Setiap negara memiliki tujuan, yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan setiap negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan masyarakat bangsanya serta pandangan hidup yang melandasinya. Pada umumnya, tujuan negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar negara yang bersangkutan. Para ahli juga berpendapat berbeda mengenai tujuan negara. Cara

pandangan yang berbeda dari para ahli dipengaruhi oleh latar belakang dan situasi lingkungan tempat dia berada. Pendapat tentang tujuan negara, antara lain sebagai berikut.

1) Tujuan negara menurut **Roger H. Soltau**

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebaskan mungkin.

2) Tujuan negara menurut **Harold J. Laski**

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang baik agar rakyat dapat mencapai keinginan secara maksimal.

3) Tujuan negara menurut **Rousseau**

Tujuan negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya.

Tujuan negara juga berkaitan dengan ideologi yang dipakai negara yang bersangkutan. Tujuan bernegara menurut ideologi liberal adalah mengusahakan kemerdekaan dan kebebasan individu sehingga mereka dapat secara bebas memenuhi kesejahteraan hidupnya. Tujuan bernegara menurut para ahli di atas adalah tujuan dalam negara liberal karena para tokoh tersebut memang dipengaruhi oleh pemikiran liberal. Sebaliknya, tujuan negara-negara sosialis lebih menitikberatkan pada usaha mewujudkan pemerataan kepada warganya.

5. Bentuk Negara

Bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan. Perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut.

a. Bentuk Negara

Bentuk negara dapat dibedakan sebagai berikut.

1) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
- b) Satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara.
- c) Seorang kepala negara ataupun kepala pemerintah untuk seluruh rakyat.
- d) Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat.

Dalam negara kesatuan dikenal dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Contoh bentuk negara kesatuan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Negara Serikat (*Federasi*)

Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah federasi yang mengendalikan kedaulatan negara. Negara bagian dalam negara serikat tidak memegang kedaulatan negara, sebab yang memegang adalah pemerintah federal. Negara bagian masih memiliki kedaulatan ke dalam untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, keuangan, dan peradilan pada umumnya merupakan urusan pemerintah federal. Contoh bentuk negara serikat adalah Amerika Serikat.

3) Perserikatan Negara (*Konfederasi*)

Pada hakikatnya, perserikatan negara bukanlah negara itu sendiri, melainkan gabungan dari negara-negara merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan penuh. Pada umumnya, konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, misalnya pertahanan bersama dan politik luar negeri.

4) Uni

Uni adalah gabungan dari berbagai negara yang dikepalai seorang kepala negara. Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu uni riil dan uni personal.

5) Dominion

Dominion adalah bentuk negara yang khusus terjadi dalam sejarah ketatanegaraan. Inggris merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris.

6) Koloni atau negara jajahan

Koloni atau negara jajahan adalah negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain.

7) Protektorat

Protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat.

8) Mandat

Mandat adalah negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II yang kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa.

9) Trust

Trust adalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) PBB.

b. Bentuk Pemerintah

Bentuk pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan dan berdasarkan cara penunjukan kepala negara.

1) Berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan

Berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan, bentuk pemerintahan dapat dibedakan sebagai berikut.

- a) Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang.
- b) Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang banyak orang.
- c) Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh semua orang (banyak orang).

2) Berdasarkan cara penunjukan kepala negara

Berdasarkan cara penunjukan kepala negara, bentuk pemerintahan dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Monarki

Dalam monarki, raja selaku kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan hak waris turun-temurun dan biasanya monarki jabatannya seumur hidup.

b) Republik

Seorang kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan pilihan rakyat dan menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu atau terbatas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah negara, dan pemerintah yang berdaulat sangat penting bagi berdirinya suatu negara.

Setelah kalian memahami materi di atas, tentunya kalian sudah paham mengenai hakikat negara. Berikut ini kami sajikan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan untuk menguji daya paham kalian!



Uji Kompetensi

1. Jelaskan pengertian negara menurut pendapat Roger H. Soltau!
2. Deskripsikan secara singkat mengenai tujuan negara menurut ideologi liberal!
3. Sebutkan perbedaan pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi!
4. Jelaskan unsur-unsur negara dalam tabel berikut!

No.	Unsur Negara	Penjelasan
1.	Rakyat	
2.	Wilayah	
3.	Pemerintah yang berdaulat	
4.	Pengakuan dari negara lain	

5. Deskripsikan bentuk-bentuk negara dalam tabel berikut!

No.	Bentuk Negara	Penjelasan
1.	Negara Kesatuan	
2.	Negara Serikat	
3.	Uni	
4.	Dominion	
5.	Koloni	
6.	Trust	

B. Arti Penting Usaha Pembelaan Negara

Kalian tentu sudah paham tentang hakikat negara. Marilah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Untuk itu simaklah baik-baik!

Sebagai warga negara apakah kita memiliki kewajiban untuk membela negara? Jika kita berkewajiban untuk membela negara, kewajiban apakah yang dapat kita lakukan? Mari kita simak hal tersebut!

1. Kewajiban Warga Negara dalam Membela Negara

Upaya bela negara oleh warga negara sangatlah diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar, upaya bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pembelaan negara sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, atau rela berkorban demi pengabdian kepada negara dan bangsa.

Unsur utama keberadaan suatu negara adalah warga negara. Warga negaralah yang memiliki kedaulatan tertinggi suatu negara. Dengan kata lain, pemilik sebenarnya suatu negara adalah warga negara. Oleh karena itu, membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Hal itu menunjukkan bahwa sebagai warga negara kita memiliki hak membela negara kita. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang.

Wujud kewajiban membela negara dewasa ini bukan berupa perjuangan mengusir para penjajah atau mereka yang ingin menggulingkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan persenjataan atau bertempur.



Sumber: www.fajar-sion.org

Gambar 1.4 Belajar giat sebagai bentuk kewajiban membela negara.

Namun, dilakukan dengan mengisi kemerdekaan melalui belajar giat atau mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan oleh negara, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 1.5 Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah sebagai bentuk usaha pembelaan negara.

Di samping itu, juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman dari luar dan dari dalam negara yang berusaha mengganggu jalannya pemerintahan negara dalam mewujudkan kehendak bersama.

Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dengan menciptakan suasana aman di lingkungan masing-masing, tidak membuat kegaduhan dan

keonaran yang mengganggu lingkungan.

Peran serta siswa dalam membela negara dapat dilakukan dengan menjaga ketertiban sekolah, tidak melakukan perbuatan tercela, coret-corek di tempat umum atau kegiatan negatif lainnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Wajib Bela Negara

Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan negara, upaya bela negara dan warganya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan wajib bela negara adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 27 ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- 2) Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Sementara itu, ayat (2) berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

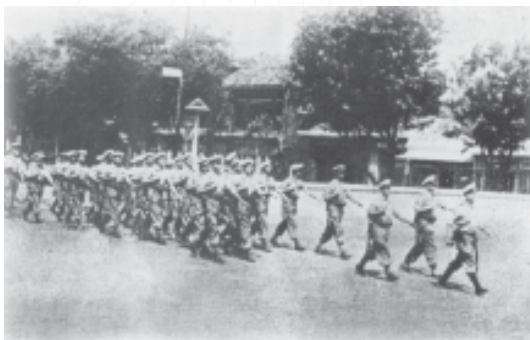
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002. Pertahanan Negara diatur dalam

- 1) Pasal 9 ayat (1) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".
- 2) Pasal 9 ayat (2) berbunyi "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui
 - a) pendidikan kewarganegaraan;
 - b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;
 - d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Dijelaskan dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 tersebut bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara, sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 2) Pemerintah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.6 Segala macam bentuk penjajahan di atas bumi harus dihapuskan.

- 3) Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- 4) Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari pandangan tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa, dan segala ancaman.
- 2) Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
- 3) Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.
- 4) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.
- 5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
- 6) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memerhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Setelah kalian membaca dan memahami materi di atas, tentu saja kalian paham tentang arti penting usaha-usaha pembelaan negara. Cobalah kerjakan soal berikut untuk menguji kemampuanmu!



Uji Kompetensi

1. Usaha apa saja yang kita lakukan untuk membela bangsa dan negara kita?
2. Sebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pembelaan terhadap negara dan warganya!

C. Usaha Pembelaan Negara

Pelajari dan pahami dengan baik materi di atas! Jika kalian sudah paham betul tentang materi di atas, mari kita simak materi kelanjutannya! Dari bab sebelumnya kalian telah mempelajari tentang arti penting usaha pembelaan negara. Sebagai kelanjutannya kalian akan mempelajari secara lengkap mengenai usaha pembelaan negara. Simaklah pembahasan berikut!

Sejak menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai ancaman datang untuk mengganggu keberadaan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia mempertaruhkan kemerdekaan yang telah dicapai untuk dipertahankan dari ancaman pihak luar yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Namun demikian, rakyat Indonesia tidak pernah rela kehilangan kemerdekaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua memahami bahwa kemerdekaan yang kita raih tidaklah diperoleh dengan mudah, dibutuhkan perjuangan panjang dengan pengorbanan yang sangat besar berupa tenaga, waktu, dana, bahkan nyawa. Oleh karena itu, upaya untuk membela negara dari ancaman kekuatan lain merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Beberapa hal yang patut kita waspadai menyangkut ancaman terhadap bangsa Indonesia yang datang dari luar negeri, antara lain sebagai berikut.

1. Keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi silang Indonesia yang strategis.
2. Keinginan negara industri untuk menguasai Indonesia karena kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
3. Bahaya perang modern berupa perang nuklir yang akan mengancam seluruh kehidupan bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.7 Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia.

4. Arus globalisasi yang menimbulkan banyak kerawanan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan perlu kita waspadai dan antisipasi.



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 1.8 Terorisme sebagai ancaman terhadap pertahanan bangsa yang harus kita waspadai.

tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, bajak laut, pencurian kekayaan alam, bahaya narkoba, dan perusakan alam. Hal tersebut menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya tertumpu pada pertahanan melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun negara.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.9 Pemberontakan PKI sebagai bentuk ancaman kedaulatan negara yang berasal dari dalam negeri yang harus diwaspadai.

berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang lebih komplekslah yang harus diwaspadai.

Di era globalisasi dewasa ini yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik), saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik) baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional

Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selamanya datang dari luar negeri. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita pernah menghadapi kelompok pemberontakan dari dalam negeri, seperti pemberontakan PKI di Madiun 1948; DI/TII di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi; Republik Maluku Selatan (RMS) dan puncaknya pemberontakan G-30-S/PKI. Dewasa ini tidak hanya pemberontakan yang kita hadapi, tetapi

Sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berbeda dengan pada masa awal kemerdekaan. Dahulu kita menghadapi pemberontakan. Pada masa kini ancaman terhadap kedaulatan negara lebih kompleks.

Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari bentuk-bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara?

Ancaman yang datang dari dalam negeri dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Ancaman kerusuhan masyarakat yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial ekonomi, yaitu apabila pembangunan nasional tidak berhasil memperkecil ketidakadilan sosial ekonomi. Contoh: aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh untuk menuntut kesejahteraan.
2. Ancaman kerusuhan masyarakat disertai kekerasan yang timbul karena golongan tertentu memaksakan kepentingan sepihak secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem politik yang ada tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Contoh: maraknya aksi demonstrasi disertai dengan tindakan anarkis.
3. Ancaman pemberontakan angkatan bersenjata dari kalangan separatis, yaitu apabila pemerataan pembangunan nasional tidak dapat menjangkau seluruh daerah secara seimbang. Contoh: munculnya gerakan-gerakan separatis yang kurang puas terhadap pembangunan nasional.
4. Ancaman pemberontakan bersenjata yang ditimbulkan oleh golongan yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru, yaitu apabila ada golongan ekstrem baik kiri maupun kanan, hendak memaksakan untuk mengubah pandangan dasar negara Indonesia. Contoh: munculnya bahaya laten yang ingin mengubah ideologi bangsa.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang berasal dari dalam negeri, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan rasa kebangsaan (nasionalisme) pada warga negara.
2. Mengembangkan sikap saling pengertian di antara warga yang memiliki perbedaan etnik, agama, dan kepentingan.
3. Mendayagunakan kekuasaan secara adil demi kesejahteraan bangsa bagi para pemegang kekuasaan yang telah diberi amanat oleh rakyat.
4. Memperkuat unsur-unsur alat pertahanan negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Upaya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. UUD 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 menyebutkan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

Dalam operasionalnya, upaya pembelaan negara didasarkan pada undang-undang sebagai berikut.

1. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
2. UU No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
3. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
5. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya, sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Selain itu, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Komponen sishankamrata dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Komponen utama adalah TNI dan Kepolisian RI yang siap melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
2. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Mobilisasi adalah tindakan pergerakan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.
3. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan komponen cadangan. Sumber daya nasional di sini adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

Keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari sishankamrata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. menjadi bagian prajurit TNI atau Polri;
2. sebagai rakyat terlatih, yang berfungsi untuk penjaga ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat, seperti
 - a. Pertahanan sipil,
 - b. Perlawanan rakyat,
 - c. Keamanan rakyat,
 - d. Resimen mahasiswa (Menwa), serta
 - e. Kegiatan Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah, PMR, PMI, dan Tim SAR.



Sumber: *Ensiklopedia Pelajar*

Gambar 1.10 Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan komponen pendukung sistem hankamrata.



Sumber: *www.Palangmerah.org*.

Gambar 1.11 PMI merupakan wujud keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari sishankamrata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara dapat diwujudkan dengan keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Untuk menguji kemampuan kalian tentang pemahaman materi di atas, cobalah kerjakan soal-soal berikut! Kalian bisa mengerjakannya dengan berdiskusi antarsiswa!



Uji Kompetensi

1. Jelaskan ancaman terhadap bangsa Indonesia baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri pada tabel berikut!

No.	Permasalahan	Penjelasan
1.	Ancaman dari luar negeri.	_____

2.	Ancaman dari dalam negeri.	_____

2. Amatilah kehidupan di lingkungan kalian sehari-hari yang dapat dikatakan sebagai ancaman dari dalam negeri dalam tabel berikut!

No.	Permasalahan	Contoh
1.	Ancaman kerusakan masyarakat yang timbul oleh kesenjangan sosial ekonomi.	_____

2.	Ancaman kerusakan masyarakat disertai kekerasan yang timbul karena pemaksaan.	_____

3.	Ancaman pemberontakan angkatan bersenjata dari kalangan separatis.	_____

4.	Ancaman pemberontakan bersenjata yang timbul oleh golongan ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru.	_____

Setelah kalian mempelajari subbab yang ada dalam setiap materi di atas, diharapkan kalian memahami tentang materi yang telah kami sajikan. Untuk itu, kita lanjutkan materi berikutnya!

D. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungannya

Pembahasan berikut merupakan bentuk pengamalan dari materi sebelumnya. Untuk itu pelajarilah baik-baik materi berikut ini, kemudian kalian bisa menerapkan bentuk pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya untuk membela tanah air sebenarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air. Tanah air menunjukkan identitas kebangsaan. Rasa cinta tanah air telah ditunjukkan oleh para pejuang kemerdekaan yang rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela dan berjuang bagi kepentingan bangsa dan tanah airnya tanpa mengharapkan imbalan secara berlebihan. Dalam hal ini akan muncul sikap nasionalisme dan patriotisme.

1. Nasionalisme

Dari istilah bangsa atau *nation* inilah melahirkan nasionalisme. Pengertian nasionalisme ada tiga, antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut *Encyclopedia Britania*, nasionalisme merupakan keadaan jiwa setiap individu yang merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan.
- b. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan.
- c. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*.

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Hubungan nasionalisme dan negara kebangsaan memiliki kaitan erat. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan/nasionalisme. Artinya, adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Rasa nasionalisme sudah dianggap telah muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-

cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan, semangat kebangsaan, dan kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme menjadikan kita memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara.

Nasionalisme menjadi persyaratan mutlak bagi hidupnya sebuah bangsa. Ideologi nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya bahwa loyalitas tidak lagi diberikan pada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, suku, dan budaya (*primordial*), namun ditujukan kepada komunitas yang dianggap lebih tinggi, yaitu bangsa dan negara. Sebagai kesimpulannya, nasionalisme sebagai ide (ideologi) menjadi *conditio sine quanon* (keadaan yang harus ada) bagi keberadaan negara dan bangsa.

2. Patriotisme



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.12 Belajar giat merupakan salah satu bentuk patriotisme.

Patriotisme berasal dari kata *patria*, artinya tanah air. Kata *patria* berubah menjadi kata *patriot* yang berarti seorang yang mencintai tanah air. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Gerakan patriotisme

muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Jadi, patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Pada dasarnya, patriotisme berbeda dengan nasionalisme meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara.

Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara:

- perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa, serta
- perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan menghancurkan negara. Selain itu, ancaman negara lain, ancaman dari kelompok bangsa sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan belajar giat sebagai seorang pelajar kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan spesialisasinya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara.

Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi penerus bangsa harus disertai maksud mengembangkan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme dalam setiap pribadi warga negara perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa antara nasionalisme dengan bangsa terdapat kaitan yang sangat erat. Negara kebangsaan dibangun atas dasar nasionalisme. Selanjutnya, nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap warga negara akan memperkuat tegaknya negara kebangsaan. Gerakan untuk senantiasa mencintai dan membela bangsanya dari ancaman negara lain atau ancaman kehancuran melahirkan patriotisme. Antara nasionalisme dengan patriotisme juga terdapat kaitan yang erat. Oleh karena itu, nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi kelangsungan hidup negara kebangsaan.

Suatu negara yang warga negaranya memiliki semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme maka warga negara tersebut dapat diandalkan untuk membela, berjuang maju, dan bersedia mengisi kemajuan dari kelangsungan bangsanya. Sebaliknya, suatu negara yang warga negaranya tidak memiliki semangat nasionalisme ataupun patriotisme maka dalam perilakunya tersebut mudah sekali melakukan tindakan yang dapat menghina nama baik bangsa, menjual harga diri bangsa, merendahkan martabat bangsa, dan tindakan lain yang berakibat melemahkan kelangsungan dan kewibawaan negara. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan, misalnya tindakan korupsi, terorisme, aksi anarkisme, ataupun pengedaran narkoba yang dapat menurunkan martabat bangsa di mata dunia.

Kecintaan akan tanah air dan bangsa telah mendorong seseorang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia menyebabkan seseorang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta tempat kelahirannya yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan seseorang menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Namun demikian, rasa cinta terhadap tanah air (nasionalisme) tidak boleh berlebihan yang akhirnya akan

memandang rendah pada negara lain atau mengarah pada chauvinisme, yaitu perasaan cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebihan dan terhadap bangsa lain memandang rendah.

Rela berkorban pada nusa dan bangsa pada masa perjuangan jelas dapat dilihat dengan adanya pengorbanan para pahlawan yang banyak kehilangan anak, orang tua, saudara, harta benda, bahkan nyawa. Sekarang ini kita tidak lagi berkorban melawan penjajah dalam bentuk fisik atau mengangkat senjata. Pada masa kini kita dapat melihat bagaimana para olahragawan berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade, Asia Games, maupun Sea Games. Para pelajar Indonesia berusaha meraih prestasi di ajang kompetisi pelajar



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 1.13 Berjuang di kancah Olimpiade untuk mengharumkan nama bangsa merupakan wujud rela berkorban.

berprestasi. Rela berkorban juga dapat ditunjukkan bagi para anggota TNI dan Polri yang bertugas mengamankan dan menjaga ketertiban suatu daerah yang sedang mengalami konflik dan jauh dari keluarga bahkan mungkin nyawa pun juga dapat dikorbankan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada hakikatnya, upaya membela negara bukan hanya berkaitan dengan mempertahankan negara, melainkan upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, segala bentuk partisipasi yang memberi dampak positif bagi keutuhan, kemajuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan wujud bela negara dari warganya.

Partisipasi warga untuk membela negara dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun negara. Wujud partisipasi tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkungan Keluarga

Wujud partisipasi warga untuk membela negara di lingkungan keluarga, antara lain sebagai berikut.

- Upaya setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong, dan saling mengasihi satu sama lain.
- Menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga.
- Menjaga nama baik keluarga, dengan melakukan perbuatan yang tidak membuat malu keluarga dan merugikan diri sendiri.

Wujud partisipasi tersebut berkaitan dengan pengamalan Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2. Lingkungan Sekolah

Wujud partisipasi warga untuk membela negara di lingkungan sekolah, antara lain sebagai berikut.

- Sebagai pelajar hendaknya belajar dengan tekun dan penuh semangat dengan bekal iman, takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menciptakan situasi belajar yang tenang, damai, dan lancar oleh semua pihak di lingkungan sekolah.
- Menjaga nama baik sekolah.
- Menjaga lingkungan alam dan melakukan kegiatan pecinta alam.
- Mengembangkan kegiatan pramuka, Patroli Keamanan Sekolah, PMR, PMI dan Tim SAR.



Sumber: www.pecintaalam.org

Gambar 1.14 Pencinta alam merupakan wujud partisipasi di lingkungan sekolah.

Wujud partisipasi tersebut berkaitan dengan pengamalan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

3. Lingkungan Masyarakat

Wujud partisipasi warga untuk membela negara di lingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat dengan saling membantu, tolong-menolong, tenggang rasa, dan menjaga keharmonisan hubungan dan kerukunan antaranggota masyarakat.
- b. Menciptakan keamanan di dalam masyarakat dengan melakukan siskamling bagiarganya.
- c. Menjaga nama baik lingkungan, dengan melestarikan dan menjaga lingkungan alam sekitar.
- d. Menjaga nama baik lingkungan dengan tidak berbuat keonaran dan perbuatan yang merugikan masyarakat banyak. Misalnya minum-minuman keras dan narkoba.

Wujud partisipasi tersebut berkaitan dengan pengamalan Pancasila terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

4. Lingkungan Bangsa dan Negara

Wujud partisipasi warga untuk membela negara di lingkungan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut.

- a. Mewujudkan ketenteraman dan kedamaian bangsa dengan saling mencintai sesama warga bangsa, saling menghormati, dan saling membantu di antara warga masyarakat.
- b. Menjaga nama baik bangsa dan negara dan turut mengharumkan nama baik Indonesia, misalnya berkompetisi di bidang olahraga, teknologi, dan kesenian.
- c. Sebagai anggota TNI bekerja keras mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri.
- d. Kepolisian juga berupaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
- e. Memelihara lingkungan hidup, misalnya tidak menebang pohon sembarangan.
- f. Saling bahu membahu antarsesama warga yang mengalami musibah banjir, tanah longsor, kabut asap, ataupun gelombang pasang.

Wujud partisipasi tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara dapat dilakukan dengan ikut partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nah, jika kalian telah paham materi di atas, cobalah mengukur kemampuan kalian dengan mengerjakan soal berikut! Kalian boleh mengerjakan soal berikut dengan berdiskusi kelompok!



Uji Kompetensi

1. Berilah contoh kegiatan yang menunjukkan partisipasi warga dalam membela negara di berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

No.	Lingkungan	Sikap/Perilaku/Kegiatan Nyata
1.	keluarga	
2.	sekolah	
3.	masyarakat	
4.	bangsa dan negara	

2. Sebutkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan patriotisme!
3. Jelaskan pendapatmu tentang sikap nasionalisme dan patriotisme yang semakin pudar di kalangan generasi muda!
4. Sebutkan peran serta generasi muda dalam usaha pembelaan negara!
5. Sebutkan sikap-sikap yang harus kita tumbuhkan dalam usaha pembelaan negara!

Penutup

Kalian sudah menyelesaikan bab pertama tentang pembelaan terhadap negara dengan baik. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang pembelaan terhadap negara berikut pengamalannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, cobalah hayati dan pahami benar makna pembelaan terhadap negara agar dapat diamalkan dengan baik.

Rangkuman

1. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
2. Usaha bela negara oleh warga negara sangatlah diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar, usaha bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pembelaan negara sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, atau rela berkorban demi pengabdian kepada negara dan bangsa.
3. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.
Peraturan perundang-undangan tentang kewajiban bela negara diatur dalam
 - a. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat (1) dan (2).
 - b. UUD Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
4. Usaha membela negara tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan negara, melainkan upaya memajukan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, segala bentuk partisipasi yang memberi dampak positif bagi keutuhan, kemajuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan wujud bela negara dari warganya.
5. Bentuk partisipasi warga untuk membela negara dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.

Kata Kunci



bela negara	patriotisme
dominion	pemerintah
koloni	protektorat
mandat	rakyat
nasionalisme	republik
negara	trust
partisipasi	uni

Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang bab ini, silakan mengerjakan tugas-tugas yang telah ada. Jika sudah selesai, periksalah bersama teman dan guru. Jika kalian mendapatkan kesulitan mintalah bantuan kepada gurumu dan disarankan untuk membaca buku sumber lain yang berkaitan dengan materi ini.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Negara adalah alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - a. Aristoteles
 - b. H.J. Laski
 - c. Roger H. Soltau
 - d. Max Weber
2. Berikut ini termasuk syarat mutlak terbentuknya suatu negara, *kecuali*
 - a. rakyat
 - b. wilayah
 - c. pengakuan dari negara lain
 - d. pemerintah yang berdaulat
3. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 - b. Pembukaan UUD 1945 alinea II
 - c. Penjelasan UUD 1945
 - d. Dasar negara RI
4. Secara *de jure*, negara Indonesia diakui oleh dunia internasional sejak
 - a. nenek moyang bangsa
 - b. 17 Agustus 1945
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. Dekret Presiden

5. Negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwalian PBB disebut
 - a. negara serikat
 - b. negara dominion
 - c. negara koloni
 - d. negara trust
6. Berikut ini negara dominion yang dikuasai Inggris, *kecuali*
 - a. Selandia Baru
 - b. Kanada
 - c. Afrika Selatan
 - d. Indonesia
7. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang disebut
 - a. demokrasi
 - b. monarki
 - c. oligarki
 - d. republik
8. Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam UUD 1945
 - a. pasal 26 dan 27
 - b. pasal 27 dan 28
 - c. pasal 27 dan 30
 - d. pasal 30 dan 28
9. Prinsip-prinsip yang dianut bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara di antaranya sebagai berikut, *kecuali*
 - a. bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan
 - b. bangsa Indonesia cinta kemerdekaan, tetapi lebih cinta perdamaian
 - c. bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif
 - d. bentuk pertahanan negara bersifat semesta
10. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diselenggarakan melalui, *kecuali*
 - a. pendidikan kewarganegaraan
 - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - c. pengabdian sebagai prajurit TNI
 - d. kewujudan WNI usia 17 tahun menjadi TNI

11. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut merupakan pengertian dari
- rasa kebangsaan
 - upaya bela negara
 - hak dan kewajiban warga
 - patriotisme
12. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
- pendidikan
 - pertahanan keamanan
 - perdamaian dunia
 - pembelaan negara
13. Berikut ini beberapa ancaman yang berasal dari dalam negeri, yang berusaha mengubah ideologi negara, *kecuali*
- pemberontakan DI/TII
 - RMS
 - penjajahan Jepang
 - pemberontakan G-30-S/PKI
14. Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara Indonesia adalah
- pemerintah
 - TNI
 - purnawirawan
 - Polri
15. Wujud partisipasi warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan melalui
- Milsuk, Wamil, dan Organisasi Pertahanan Wilayah
 - Satpam, Satgas, dan Milsuk
 - Hansip, Satpam, dan preman
 - LSM, Ormas, dan Satgas
16. Upaya pembelaan negara didasarkan peraturan berikut ini, *kecuali*
- UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI
 - UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

17. Berikut ini makna yang terkandung dalam patriotisme bagi bangsa Indonesia, *kecuali*
 - a. ciri khas kepribadian bangsa Indonesia
 - b. landasan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa
 - c. landasan kehidupan bangsa yang sukuisme, chauvinisme, dan ekstremisme
 - d. falsafah hidup bangsa Indonesia tercermin dalam sila ketiga Pancasila
18. Partisipasi warga dalam pembelaan negara dapat dilakukan di lingkungan keluarga seperti
 - a. membuat tembok tinggi sebagai pagar rumahnya
 - b. menyewa penjaga rumah agar tidak ada pencuri
 - c. menjaga ketenteraman dan kedamaian keluarga
 - d. mengadakan ronda malam di lingkungan masyarakat
19. Menjaga nama baik bangsa dan negara merupakan perwujudan pembelaan bangsa dan negara yang dapat kita lihat dalam tindakan berikut ini
 - a. selalu menggunakan produk luar negeri
 - b. selalu mengadakan wisata ke luar negeri
 - c. mau menjadi warga negara asing
 - d. tidak mau diajak teman untuk menggunakan narkoba
20. Nasionalisme Indonesia mengajarkan kepada kita untuk membina semangat kebangsaan yang dilandasi perasaan sebagai bagian dari umat manusia maka melahirkan sikap
 - a. tidak terlalu memikirkan kepentingan bangsa lain
 - b. meneropong maksud jahat bangsa lain
 - c. menghormati kemerdekaan bangsa lain
 - d. menguasai bangsa lain

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Ada tiga unsur pokok bagi terbentuknya suatu negara, yaitu ..., ... dan
2. Pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional adalah pengakuan secara
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Pertahanan Negara adalah
4. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh ... sebagai kekuatan utama dan ... sebagai kekuatan pendukung.

5. Bangsa Indonesia menentang dengan tegas adanya penjajahan di atas dunia ini dan harus dihapuskan seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, alinea
6. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik
7. Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum adalah
8. Mengikuti kegiatan Pramuka, PMR, PMI, dan Tim SAR merupakan wujud partisipasi di lingkungan
9. Perjuangan membela negara yang dilakukan putra putri pelajar Indonesia dalam pergelaran Olimpiade matematika atau fisika tingkat dunia adalah perjuangan di bidang
10. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Sebutkan unsur-unsur negara baik konstitutif maupun deklaratif!
2. Sebutkan dasar hukum tentang upaya pembelaan negara!
3. Beri contoh beberapa sikap dan perilaku yang termasuk upaya pembelaan bangsa di lingkungan sekolah!
4. Siapa sajakah yang dapat dikatakan sebagai komponen pendukung dalam sishankamrata?
5. Sebutkan beberapa ancaman yang timbul dari dalam negeri yang dapat mengancam pertahanan dan ketahanan bangsa!

Selamat belajar!

Bab 2

Otonomi Daerah

Sumber: Ensiklopedia Geografi

Setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda. Tidak mungkin bagi pemerintahan pusat menangani semua masalah yang ada di tiap daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan otonomi daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan diberikannya otonomi pada daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

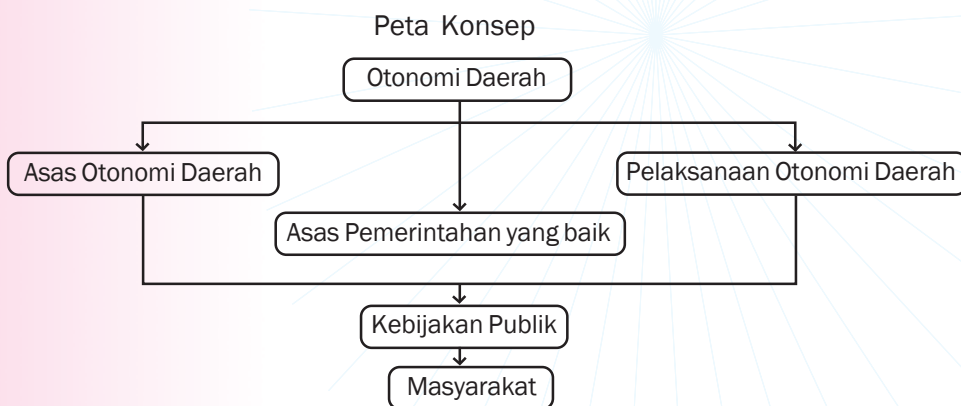
Selamat berjumpa di bab kedua ini!

Dalam bab yang kedua ini, kalian akan mempelajari pokok bahasan tentang pelaksanaan otonomi daerah, yang diawali dengan pembahasan tentang hakikat otonomi daerah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, dan partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Tahukah kalian maksud pelaksanaan otonomi daerah, arti penting partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, serta partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah?

Materi dalam bab ini sangat penting untuk kalian pelajari dan pahami. Dengan mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan hakikat otonomi daerah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah, serta bentuk partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam bab ini juga kami lengkapi peta konsep untuk memperjelas materi sehingga memudahkan kalian untuk mempelajarinya.



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi dalam bab ini dibagi menjadi empat subbab.

Subbab A Hakikat Otonomi Daerah

Subbab B Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Subbab C Partisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelajarilah bab ini baik-baik secara bertahap kegiatan demi kegiatan dan kerjakan pula soal-soal yang ada dalam setiap kegiatan sehingga kalian dapat mengukur kemampuan sendiri berkaitan dengan bab yang telah kalian pelajari.

A. Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan *otonomi daerah* adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud *daerah otonom* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber dana nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesertaan, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan kesadaran akan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maksud kewenangan otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut.

a. Kewenangan Otonomi Daerah

Kewenangan otonomi daerah adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan seperti kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

c. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan. Pemberian otonomi antara lain sebagai berikut:



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.1 Pelayanan kesehatan merupakan bentuk pemberian otonomi daerah.

- 1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas;
- 2) pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
- 3) pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Otonomi Daerah

Asas otonomi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara pada pemerintahan pusat. Pemerintahan di daerah tinggal melaksanakan segala sesuatu yang telah ditugaskan oleh pemerintah pusat.

Contoh pemerintahan sentralisasi adalah pemerintahan Hindia Belanda pada zaman dahulu. Pemerintah Hindia Belanda dipegang oleh gubernur jenderal. Para gubernur di daerah hanya melaksanakan tugasnya di *gubernemen* (setingkat provinsi) masing-masing.

b. Desentralisasi

Dalam UUD 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa bangsa Indonesia menganut asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah.

Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian terbagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut menjalankan pemerintahannya secara otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Desentralisasi di bidang pemerintah adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintah atau daerah di tingkat atasnya kepada daerah di bawahnya dan menjadi urusan rumah tangganya. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Desentralisasi bertujuan untuk

- 1) mencegah pemusatan keuangan, dan
- 2) mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.

c. Dekonsentrasi

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah.

Mengingat faktor-faktor efisiensi dan efektivitas dalam tata laksana pemerintahan, dan berdasarkan asas dekonsentrasi, pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada aparat yang berada di daerah, yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini, selain disebut sebagai alat pemerintah daerah, juga berfungsi sebagai aparatur dekonsentrasi. Kepala pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara operasional dikoordinasi oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada daerah.

d. Asas perbantuan

Asas perbantuan ialah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, pemerintah kota menarik pajak kendaraan yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan asas tersebut, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi. Pemerintahan adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur masyarakat di bawahnya. Pemerintahan di sini dapat berarti pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Peraturan di masyarakat itu selalu mengalami pertumbuhan, perubahan, dan pergantian sesuai dengan pertumbuhan masyarakatnya. Dengan demikian, warga masyarakat juga harus aktif mengikuti perubahan, pergantian, dan perkembangan aturan atau hukum tersebut agar sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah memiliki wewenang menciptakan aturan berupa kebijakan yang berlaku untuk seluruh masyarakatnya dan berlaku untuk setiap golongan yang tertulis dan mempunyai nilai memaksa. Maksud nilai memaksa adalah pemerintah dapat mewajibkan setiap anggota masyarakat melaksanakan peraturan tersebut dan memberi sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Peraturan yang berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan disebut kebijakan publik atau kebijakan yang berlaku umum.

3. Asas Pemerintahan yang Baik

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. digunakan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas
 - 1) *asas kepastian hukum*; maksudnya apa pun yang dilakukan pemerintah daerah haruslah berdasarkan hukum yang berlaku;
 - 2) *asas tertib penyelenggaraan negara*; maksudnya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi negara;
 - 3) *asas kepentingan umum*; maksudnya, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah untuk kepentingan umum;
 - 4) *asas keterbukaan*; maksudnya, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dan tidak boleh ditutup-tutupi;
 - 5) *asas proporsionalitas*; maksudnya, penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah;

- 6) *asas profesionalitas*; maksudnya, penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang masing-masing;
 - 7) *asas akuntabilitas*; maksudnya, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat;
 - 8) *asas efisiensi*; maksudnya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga;
 - 9) *asas efektivitas*; maksudnya, penyelenggaraan pemerintah daerah itu harus bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan semula.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Setiap pelaksanaan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diatur melalui Undang-Undang. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan otonomi daerah akan terarah.

a. Peraturan Pemerintah yang Mengatur Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang diatur dengan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan pengembangan dari peraturan pemerintah, sebagai berikut.

- 1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

b. Bentuk Pemerintahan Daerah

Sebagai dampak atas penyelenggaraan otonomi daerah maka masing-masing daerah diberi wewenang untuk menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya, dengan mempertimbangkan tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem

manajemen anggaran dan manajemen publik. Pemberian wewenang otonomi daerah diserahkan melalui Badan Perwakilan Daerah masing-masing sehingga bentuk dan susunan pemerintahan daerah dilakukan melalui tingkatan sebagai berikut.

1) Tingkat Provinsi atau Kabupaten

Di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif dan pemerintahan daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kedudukan sebagai berikut.

- a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana melaksanakan demokrasi berdasar Pancasila.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif di daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.



Sumber: dprd.tarakan.go.id

Gambar 2.2 DPRD sebagai badan legislatif pemerintah daerah.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut.

- a) Memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
- b) Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
- d) Bersama dengan gubernur, bupati, atau wali kota membentuk peraturan daerah.
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, dan wali kota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
- f) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

2) Tingkat Desa

Di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa. Badan perwakilan desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) mengayomi adat istiadat;
- b) membuat peraturan desa;
- c) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan.

Pahamilah baik-baik materi di atas! Untuk menguji kemampuan kalian berkaitan materi tersebut, kerjakan soal berikut. Kalian boleh mengerjakannya dengan diskusi kelompok!



Uji Kompetensi

1. Bagaimana pendapatmu tentang adanya otonomi daerah? Menguntungkan atau merugikan? Berilah contohnya!

2. Jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam tabel berikut!

No.	Pernyataan	Penjelasan
1.	Otonomi daerah	
2.	Daerah otonom	
3.	Kewenangan otonomi daerah	
4.	Otonomi nyata	
5.	Otonomi yang bertanggung jawab	

3. Dengan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah ada beberapa asas. Sebutkan asas-asas tersebut dan berilah penjelasan!

B. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah

Tahukah kalian tentang arti kebijakan publik dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tersebut? Simaklah penjelasan berikut ini!

1. Arti Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Tujuan pembuatan kebijakan publik adalah

- mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;
- melindungi hak-hak masyarakat;
- mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat;
- mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dari masyarakat. Masukan dari masyarakat sangat penting dalam perumusan kebijakan publik karena pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan berupa usul, saran, atau memberikan gambaran tentang dampak negatif atau positif.

2. Tipe kebijakan Publik

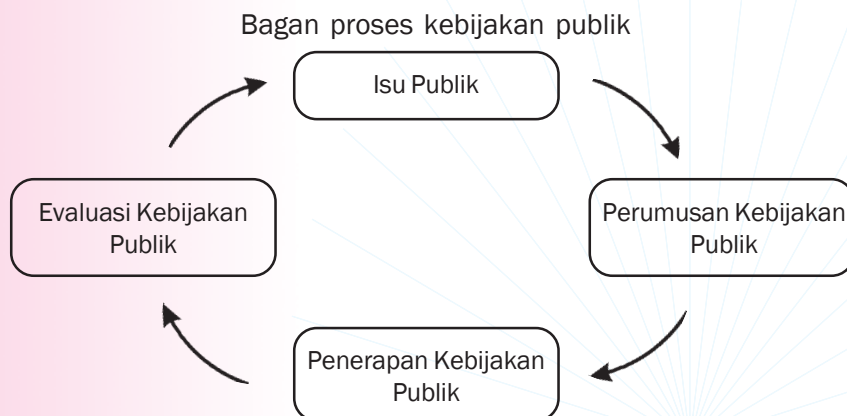
Secara konkret, isi kebijakan publik dapat dibedakan atas empat tipe kebijakan, yaitu kebijakan regulatif, kebijakan redistributif, kebijakan distributif, dan kebijakan konstituen.

- a. *Kebijakan regulatif* adalah kebijakan yang bersifat mengatur. Karena bersifat mengatur, kebijakan ini mengandung paksaan dan harus diterapkan secara langsung pada warga masyarakat. Adapun tujuan kebijakan ini agar seseorang tidak melakukan tindakan yang dilarang. Contohnya, larangan berdagang di sepanjang trotoar, larangan pengendara kendaraan umum untuk melewati jalur tertentu.
- b. *Kebijakan redistributif* adalah kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali. Contohnya, kebijakan pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Dari hasil pungutan tersebut didistribusikan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum seperti, jalan ataupun jembatan.
- c. *Kebijakan distributif* adalah kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat. Kebijakan ini pada umumnya berupa penggunaan anggaran belanja daerah yang dapat dimanfaatkan secara langsung pada individu. Contohnya, penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai sekolah gratis dan subsidi bahan bakar minyak.
- d. *Kebijakan konstituen* mencakup berbagai kebijakan yang tidak termasuk dalam ketiga kebijakan di atas. Kebijakan ini berhubungan dengan masalah keamanan, masalah luar negeri, dan pelayanan administrasi.

3. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah kebijakan publik. Kebijakan itu dapat mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, dan sosial.

Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat. Supaya berjalan dengan baik dan memiliki manfaat, kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dengan peraturan. Salah satu pihak yang berperan penting adalah masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan publik yang telah dibuat tidak akan ada gunanya. Berikut ini penjelasan proses pembuatan kebijakan publik.



Penjelasan

- a. Sebuah isu (masalah publik) yang menyangkut masalah orang banyak atau bahkan menyangkut keselamatan bersama biasanya tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dan menuntut sebuah penyelesaian dari pemerintah. Misalnya, masalah limbah atau pembuangan sampah. Pada awalnya, jumlah sampah yang sedikit tidak dipedulikan masyarakat, namun setelah sampah yang menumpuk, mengeluarkan bau busuk, dan mengganggu kesehatan masyarakat, baru muncul protes. Penduduk yang tinggal di daerah pembuangan sampah mengajukan protes agar sampah tidak lagi dibuang di daerah mereka. Hal ini bisa menjadi kebijakan publik. Karena masalah pembuangan sampah tidak bisa dihentikan begitu



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 2.3 Sampah yang menumpuk dan mengeluarkan bau busuk merupakan salah satu contoh isu publik.

saja. Orang membuang sampah setiap hari. Kalau tidak ada tempat pembuangan sampah, kota akan penuh dengan sampah. Di lain pihak, protes masyarakat tidak boleh didiamkan begitu saja. Agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, pemerintah mengangkat masalah sampah sebagai sebuah isu publik.

- b. Pemerintah merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk merumuskannya, pemerintah dapat meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota masyarakat. Rumusan kebijakan ini akan menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mulai dari pejabat pemerintah sampai anggota masyarakat.
- c. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga secara bersama-sama. Dalam kasus pembuangan sampah tersebut, pemerintah dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang modern atau mencari lokasi lain.
- d. Setelah kebijakan publik dibuat, dilakukan evaluasi. Apakah pemerintah telah membuat kebijakan publik yang dapat menyelesaikan masalah atau justru sebaliknya, pemerintah membuat masalah baru. Jika kebijakan publik itu tidak menyelesaikan masalah, kebijakan itu dapat menjadi isu baru dan dapat kembali dikeluarkan kebijakan yang baru.

3. Manfaat Masyarakat Melakukan Partisipasi dalam Kebijakan Publik di Daerah

Manfaat masyarakat melakukan partisipasi dalam kebijakan publik di daerah, antara lain sebagai berikut.

a. Membentuk Perilaku atau Budaya Demokrasi



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 2.4 Pemilu sebagai bentuk budaya demokrasi.

Apabila anggota masyarakat terbiasa aktif dalam kebijakan publik maka akan terbentuk budaya demokrasi. Salah satu inti dalam budaya demokrasi adalah hak politik rakyat untuk bebas berorganisasi, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun nonlisan. Masyarakat bebas mendukung ataupun menentang kebijakan yang diambil pejabat negara.

b. Membentuk Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum. Mereka terbiasa mengikuti peraturan yang ada. Jika ada hukum yang tidak sesuai, mereka tidak melanggarnya. Namun, mereka berusaha untuk mengubah peraturan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Apabila kita terbiasa aktif dalam kebijakan publik, kita juga akan terbiasa berusaha mengikuti aturan hukum. Apabila kita tidak menyukai kebijakan tersebut, kita akan mengubahnya dengan jalur hukum yang ada. Kita tidak boleh membuat kerusakan sebagai tanda ketidaksetujuan.

c. Membentuk Masyarakat yang Bermoral dan Berakhlak Mulia

Pengajuan usul yang disampaikan secara sopan dapat membuat masyarakat terbiasa bersikap baik dan menumbuhkan suasana yang penuh kekeluargaan, saling menghormati, dan menghargai hak-hak sebagai sesama manusia. Dengan demikian, akan terbentuk masyarakat yang bermoral dan memiliki akhlak mulia.

d. Membentuk Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bekerja sama secara damai. Masyarakat menghormati dan tunduk pada hukum. Setiap anggota masyarakat dipandang sama di depan hukum. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Kesukarelaan, artinya masyarakat madani terbentuk bukan karena paksaan. Mereka secara sukarela membentuk kehidupan bersama karena mempunyai cita-cita yang sama.
- 2) Keswasembadaan, artinya tiap individu mandiri dan tidak mau menggantungkan diri pada orang lain. Setiap anggota masyarakat punya harga diri yang tinggi, percaya kemampuan diri sendiri, bahkan berusaha untuk membantu orang lain yang kekurangan.
- 3) Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya anggota dari sebuah masyarakat yang madani tidak mau tergantung pada negara, lembaga, atau organisasi.
- 4) Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Masyarakat madani berdiri di atas hukum yang disepakati bersama. Tidak ada nilai hukum yang dipaksakan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Tidak ada pula kekuasaan yang mencengkeram dan memaksakan kehendaknya.

4. Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik di Daerah

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah perlu peran aktif masyarakat. Apabila masyarakat tidak berperan aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, terdapat berbagai konsekuensi. Untuk itu, simaklah uraian berikut.

a. Respons Masyarakat ketika Dilakukan Kebijakan Publik

Ketika kebijakan publik dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat untuk mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah. Akan tetapi, harapan pemerintah tersebut tidak selamanya terpenuhi.

Respons atau tanggapan masyarakat ketika kebijakan publik dikeluarkan, antara lain sebagai berikut.

1) Positif

Orang yang memandang positif sebuah kebijakan publik yang akan dikeluarkan akan mendukung peraturan tersebut dengan penuh kesadaran. Ia merasa peraturan tersebut menguntungkan dan membawa kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindakan yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) menyampaikan usul dan saran dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang sesuai dengan rancangan peraturan tersebut dan ditujukan kepada pemerintah daerah ataupun DPRD;
- b) mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c) mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerah atau DPRD;
- d) memberikan dorongan moral kepada peserta sidang yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut.

2) Antisipatif

Orang yang bersikap antisipatif tanggap akan kemungkinan yang terjadi dengan diterapkannya peraturan tersebut. Ia tidak mendukung atau menolak peraturan tersebut. Akan tetapi, ia memikirkan cara agar ia tidak terkena sanksi atau ketentuan peraturan tersebut.

3) Negatif

Orang yang memiliki respons negatif terhadap peraturan akan menolak peraturan tersebut. Hal ini dilakukan karena ia menganggap peraturan tersebut akan merugikan dirinya. Kebebasan atau keuntungan yang semula ia dapatkan akan berkurang dengan adanya peraturan tersebut.

b. Hal-Hal yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Aktif dalam Kebijakan Publik

Hal yang menyebabkan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor *internal* adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor *eksternal* adalah faktor yang berasal dari luar anggota masyarakat.

1) Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut.

a) Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik merupakan saat yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengajukan usulannya. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mau memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa alasannya berasal dari dalam diri anggota masyarakat tersebut. Hal-hal yang menyebabkannya adalah sebagai berikut.

- (1) Masyarakat sudah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa partisipasi warga.

Selama ini warga telah terbiasa patuh pada perintah dari pusat tanpa mempertanyakan aturan tersebut. Karenanya, ketika kesempatan berpartisipasi dibuka, sulit bagi mereka untuk mengubah pola pemikiran yang telah ada.

- (2) Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan untuk berpartisipasi

Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan media, sangat sulit untuk mendapatkan informasi.

Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau informasi dari pemimpinnya. Padahal, pemimpin mereka belum tentu tahu adanya kesempatan ini. Akibatnya, perumusan kebijakan publik sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

- (3) Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi

Untuk berpartisipasi diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar. Misalnya, menyampaikan pendapat tersebut kepada wakil rakyat. Akan tetapi, sering kali pengetahuan mengenai prosedur ini tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka tidak tahu cara menyalurkan pendapatnya. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi.

- (4) Masyarakat tidak mau tahu

Tidak semua anggota masyarakat memberikan perhatian pada apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Mungkin kebijakan publik tersebut tidak berhubungan dengan kepentingannya sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya untuk ikut berpartisipasi.

- b) Pelaksanaan Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat. Setelah kebijakan publik terbentuk sering kali kebijakan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Hambatan pelaksanaan kebijakan publik yang berasal dari dalam diri anggota masyarakat adalah sebagai berikut.

- (1) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik.

Harus kita akui bahwa kesadaran hukum anggota masyarakat kita belum sebaik yang diharapkan. Banyak pelanggaran yang terjadi hanya karena tidak ada polisi yang mengawasi atau tidak ada orang yang melihat. Rendahnya kesadaran hukum inilah yang membuat sebuah kebijakan publik sulit untuk berjalan dengan baik.



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 2.5 Rendahnya kesadaran hukum membuat sebuah kebijakan publik sulit berjalan dengan baik.

- (2) Masyarakat sengaja melanggar karena sanksinya tidak tegas.

Peraturan yang baik adalah peraturan yang menegaskan sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam kenyataannya ada beberapa peraturan yang tidak jelas sanksinya sehingga jika ada orang yang melanggar, sulit dikenakan hukuman. Contohnya, peraturan penebangan hutan. Meski ada yang menebang pohon, namun tidak ada orang yang ditangkap. Akhirnya, masyarakat enggan untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut.

- a) Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Tidak semua pihak dalam pemerintahan mau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika membuat rumusan kebijakan publik. Hal ini terjadi karena memang selama ini jarang dibuka kesempatan bagi publik untuk ikut berpartisipasi.

- (2) Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat.

Salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat belum maksimal karena sosialisasi mengenai hal ini belum merata kepada anggota masyarakat. Bisa jadi karena anggota masyarakat itu hidup jauh dari jangkauan media massa sehingga mereka kurang tahu mengenai kesempatan berpartisipasi ini.

- (3) Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah.

Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan, tetaplah tidak mudah untuk mengubah sebuah pola yang telah berjalan selama puluhan tahun. Selama ini masyarakat dan orang-orang yang duduk di pemerintahan telah terbiasa dengan pola sentralisasi. Dengan masih diterapkannya pola sentralisasi ini, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dan masyarakat tinggal menjalankannya tanpa banyak pertanyaan. Hal ini berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang menghendaki adanya partisipasi anggota masyarakat.

- (4) Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik.

Ada kalanya sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat dibahas. Salah satu alasannya karena kebijakan itu mendesak. Jika melibatkan masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah pendapat tersebut bahkan mengubah kebijakan publik

tersebut sebelum dilaksanakan. Agar kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu meminta partisipasi dari anggota masyarakat.

b) Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

Jika sebuah kebijakan publik dibuat tanpa partisipasi dari anggota masyarakat, besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Artinya, kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka, sehingga masyarakat enggan berpartisipasi melaksanakan kebijakan publik itu.

- (2) Kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan masyarakat.

Alasan lain mengapa masyarakat enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik, dikarenakan kebijakan



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 2.6 Penebangan hutan merupakan kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan masyarakat.

publik tersebut tidak memihak kepentingan masyarakat. Misalnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengizinkan penebangan hutan. Hal ini ditolak masyarakat karena bisa menimbulkan banjir. Selain itu, kebijakan tersebut tidak memihak kepada kepentingan masyarakat (melainkan kepentingan para pengusaha). Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

(3) Hukum belum ditegakkan secara adil.

Masalah lain yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah belum ditegakkannya hukum secara adil. Masyarakat masih merasa hukum berpihak pada orang yang berkuasa dan memiliki uang yang banyak. Masih ada penegak hukum yang bisa disuap. Selama hukum belum dihormati dan ditegakkan tanpa pandang bulu, akan sulit bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara maksimal. Akibatnya, kebijakan publik itu juga akan sulit bertahan lama.

(4) Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.

c) Dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik, antara lain sebagai berikut.

(1) Aktif

Dengan keaktifan masyarakat diharapkan akan muncul kebijakan publik yang dapat

- (a) melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (b) selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

(2) Tidak aktif

Apabila masyarakat tidak aktif, akan muncul beberapa dampak negatif yang dapat merugikan, yaitu

- (a) perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh;
- (b) kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
- (c) kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dari masyarakat. Dengan demikian, partisi-

pasi dari masyarakat sangat diharapkan dalam perumusan kebijakan publik, karena pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Nah, setelah kalian membaca dan memahami materi di atas, coba ingat-ingat kembali materi tersebut untuk menjawab soal-soal berikut ini! Kalian dapat mengerjakannya dengan berdiskusi kelompok!



Uji Kompetensi

1. Jelaskan proses kebijakan publik dalam bagan berikut ini!



2. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat. Supaya berjalan dengan baik dan bermanfaat, kebijakan publik harus dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi. Sebutkan manfaat masyarakat melakukan partisipasi dalam kebijakan publik di daerah beserta penjelasannya!

No.	Manfaat	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

3. Ketika kebijakan publik dikeluarkan, pemerintah daerah mengharapkan anggota masyarakat untuk mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut. Akan tetapi, tidak selamanya harapan pemerintah tersebut terpenuhi karena respons atau tanggapan masyarakat berbeda-beda. Sebutkan respons atau tanggapan masyarakat ketika kebijakan publik dikeluarkan!

No.	Respons Masyarakat ketika Kebijakan Publik Dikeluarkan	Penjelasan
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

C. Partisipasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah akan sia-sia belaka. Dengan demikian, segala aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat ditampung di daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memerhatikan masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

1. Masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak masalah yang timbul. Adapun masalah yang muncul, antara lain pemilihan kepala daerah, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), mobilisasi PNS, dan meningkatnya KKN.

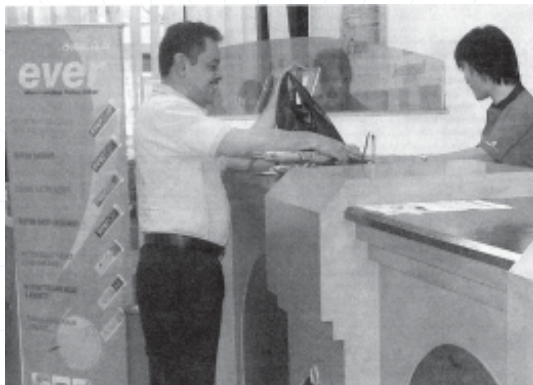
a. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah sering menimbulkan kerawanan karena adanya sikap-sikap arogan yang dilakukan oleh pendukung calon yang kalah ataupun yang

menang dalam pemilihan. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat belum dewasa dalam berdemokrasi. Sebagian masyarakat belum siap menerima kekalahan dalam suatu pemilihan kepala daerah sehingga masih sering muncul keributan yang dapat menyulut perpecahan dalam masyarakat. Untuk menghindari adanya sikap arogansi masyarakat maka diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat. Para elit politik hendaknya tidak menjadi provokator, tetapi memberikan contoh berdemokrasi yang benar.

b. Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan berlakunya otonomi daerah maka setiap daerah seakan berlomba untuk menggali potensinya demi peningkatan pendapatan asli daerah. Bagi daerah yang kaya sumber alam akan mudah meningkatkan PAD, tetapi bagi daerah yang miskin dan minim sumber daya alam akan sulit meningkatkan



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 2.7 Pajak sebagai salah satu usaha meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain dengan menaikkan pajak daerah, retribusi daerah, dan meningkatkan pendapatan perusahaan daerah, seperti PDAM, dan Bank Pasar. Dalam demokrasi ini, rakyat sudah berani memberikan koreksi atas kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Peningkatan beban masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat, yang akhirnya akan terjadi protes atau demonstrasi menentang pemerintah yang berkuasa.

c. Mobilisasi PNS

Sekarang ini perpindahan pegawai negeri dari daerah satu ke daerah lain dirasakan sangat sulit. Sulitnya perpindahan PNS antardaerah akan membawa permasalahan pada pemerataan sumber daya manusia.

Daerah-daerah yang memiliki pegawai dengan sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan mengizinkan pegawainya pindah ke daerah lain. Hal ini akan dapat mendorong timbulnya sikap kedaerahan yang akhirnya akan melunturkan wawasan kebangsaan. Berkurangnya sikap nasionalisme dan meningkatnya wawasan kedaerahan dalam jajaran pemerintahan daerah dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Meningkatnya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)

Meningkatnya kewenangan yang diberikan pada daerah dapat mendorong munculnya kolusi, korupsi, dan nepotisme, seperti peningkatan anggaran-anggaran dewan, penumpukan fasilitas pejabat, dan penyimpangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Praktik-praktik KKN yang muncul apabila tidak disikapi oleh aparat penegak hukum maka pelaksanaan otonomi daerah hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu yang mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya.

2. Peran Aktif Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Masyarakat perlu berperan aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah. Peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. melaporkan pejabat daerah yang sewenang-wenang pada rakyat;
- b. melaporkan pejabat daerah yang melaksanakan KKN;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah dalam perencanaan pembangunan;
- d. membantu memberantas kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan;
- e. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wujud peran aktif tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Setelah mempelajari materi tersebut diharapkan kalian memahaminya dengan baik. Untuk itu, ujilah kemampuanmu dalam memahami materi di atas dengan mengerjakan soal berikut!



Uji Kompetensi

1. Sebutkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah!
2. Bagaimana pendapatmu mengenai meningkatnya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di negara kita?
3. Bagaimanakah tindakanmu untuk memberantas aksi kolusi, korupsi, dan nepotisme yang semakin merajalela?
4. Buatlah kliping tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia!
5. Sebutkan beberapa peran aktif masyarakat dalam memecahkan masalah yang timbul pada pelaksanaan otonomi daerah! Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Peran Aktif Masyarakat dalam Masalah-Masalah yang Timbul pada Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Penutup

Selamat! Kalian telah menyelesaikan bab kedua tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan baik. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang hakikat otonomi daerah, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pelajaran yang telah kalian pelajari ini, kurang bermakna jika tidak ditindaklanjuti dengan pengamalannya. Oleh karena itu, berusaha menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan belajar tersebut.

Rangkuman

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
2. Asas otonomi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sentralisasi
 - b. Desentralisasi
 - c. Dekonsentrasi
 - d. Asas perbantuan
3. Kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dari masyarakat. Masukan dari masyarakat sangat penting dalam perumusan kebijakan publik karena pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
4. Tujuan pembuatan kebijakan publik adalah
 - a. mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;
 - b. melindungi hak-hak masyarakat;
 - c. mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat;
 - d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Dengan dikeluarkannya kebijakan publik dari pemerintah daerah diharapkan anggota masyarakat mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah.



Kata Kunci

badan perwakilan desa	kebijakan publik
daerah otonom	masyarakat madani
dekosentrasi	otonomi daerah
desentralisasi	sentralisasi

Tidak lupa juga dalam bab ini, kami lengkapi tugas-tugas yang harus kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Cobalah kerjakan tugas-tugas tersebut dengan baik!

Jika sudah selesai, diskusikan dengan temanmu dan jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakannya mintalah bantuan kepada Bapak/Ibu gurumu. Kalian disarankan mempunyai rujukan lain berkaitan dengan materi dalam bab ini.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai warga negara yang baik, tindakan yang harus dilakukan apabila tidak setuju dengan peraturan yang berlaku di masyarakat adalah
 - a. membuat aturan baru yang sesuai keinginan kita
 - b. melanggar aturan itu karena bukan keinginan kita
 - c. menyampaikan usul dan saran agar dilakukan evaluasi
 - d. tidak perlu memerhatikan peraturan tersebut
2. Berikut ini *bukan* termasuk ciri-ciri masyarakat madani adalah
 - a. kegotongroyongan
 - b. kemandirian
 - c. keswasembadaan
 - d. kesukarelaan
3. Salah satu manfaat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik di daerah adalah
 - a. menunjukkan eksistensi masyarakat
 - b. mempercepat tercapainya tujuan bersama
 - c. membentuk masyarakat hukum
 - d. memengaruhi orang lain dalam menentukan pendapat
4. Penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan semula merupakan asas
 - a. efektivitas
 - b. efisiensi
 - c. akuntabilitas
 - d. profesionalitas

5. Berikut ini dampak negatif yang muncul sebagai akibat apabila kebijakan publik hanya dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, *kecuali*
- kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik
 - harga kebutuhan pokok semakin naik
 - turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
 - kebijakan publik tersebut tidak memihak kepentingan masyarakat
6. Faktor internal yang menyebabkan anggota masyarakat tidak ikut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah
- masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
 - adanya kesempatan berpartisipasi belum diketahui masyarakat
 - masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah
 - tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
7. Amir adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan kaya. Di desanya sedang diadakan program guna meningkatkan kecerdasan penduduk desa. Ia diminta membantu program tersebut, tetapi dia menolak karena program tersebut dianggap merugikan dan menyita waktunya.
- Dari contoh di atas menunjukkan bahwa Amir memandang program tersebut secara
- positif
 - negatif
 - antisipatif
 - pasif
8. Salah satu inti dalam budaya demokrasi adalah hak politik rakyat untuk
- protes terhadap peraturan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat
 - ikut dalam pemilihan umum
 - berorganisasi, berkumpul, menyatakan pendapat
 - musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama
9. Kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali disebut
- kebijakan regulatif
 - kebijakan kontituen
 - kebijakan distributif
 - kebijakan redistributif

10. Apabila kita mengetahui pejabat pemerintah melakukan KKN, kita harus bersikap
 - a. membiarkan saja karena bukan urusan kita
 - b. melaporkan pada pihak penegak hukum
 - c. membiarkannya yang penting tidak mengganggu urusan kita
 - d. meminta bagian untuk rakyat
11. Proses pembuatan kebijakan publik diawali dengan
 - a. perumusan kebijakan publik
 - b. penerapan kebijakan publik
 - c. isu/masalah publik
 - d. evaluasi kebijakan publik
12. Pak Yoso seorang pedagang kaki lima. Kewajibannya dalam mematuhi peraturan dibuktikan dengan
 - a. berjualan dengan tekun
 - b. tidak perlu membayar pajak/retribusi
 - c. membersihkan tempat jualan setiap hari
 - d. membayar retribusi dengan ikhlas
13. Pembukaan dan promosi taman wisata argo, religi, bahari, dan industri merupakan kewenangan dari
 - a. pemerintah pusat
 - b. pemerintah daerah
 - c. departemen pendidikan dan kebudayaan
 - d. masyarakat sekitar lokasi
14. Pak Danu mendapatkan undangan rapat kegiatan di kampungnya. Pak Danu tidak datang karena sakit. Setelah rapat selesai, ia tidak setuju dengan hasil keputusan musyawarah.
Sikap yang seharusnya dilakukan Pak Danu adalah
 - a. menerima hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab
 - b. tidak melaksanakan hasil keputusan
 - c. menolak dan tidak terima dengan keputusan tersebut
 - d. berhenti mengikuti kegiatan di kampung
15. Joni adalah orang yang antisipatif terhadap suatu peraturan. Oleh karena itu, Joni bersikap
 - a. menerima peraturan
 - b. menolak peraturan
 - c. tidak mendukung atau menolak peraturan
 - d. menerima peraturan dengan syarat tertentu

16. Pembuatan kebijakan publik tanpa partisipasi dari anggota masyarakat besar kemungkinan tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung, artinya
 - a. kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat
 - b. kebijakan itu sesuai dengan rakyat
 - c. kebijakan itu tidak mendapat perhatian rakyat
 - d. kebijakan itu hanya dibuat sesuai dengan pengamatan pemerintah
17. Masalah lain dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah belum ditegakkan hukum secara adil karena masyarakat merasa hukum hanya berpihak pada
 - a. masyarakat perkotaan
 - b. orang yang berkuasa
 - c. masyarakat pedesaan
 - d. masyarakat miskin
18. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR diberi kepercayaan rakyat untuk
 - a. menyalurkan aspirasi rakyat
 - b. menyampaikan keinginannya sendiri
 - c. menguji kecerdasannya tentang hukum
 - d. berbuat sesuka hati
19. Tindakan pemerintah dalam menanggapi masyarakat yang menuntut hak dan kepentingannya adalah
 - a. dibiarkan saja
 - b. berdiskusi untuk mencari kesepakatan bersama
 - c. membayar mereka untuk menghentikan tuntutan mereka
 - d. memberikan janji agar menghentikan tuntutan mereka
20. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat disebut
 - a. daerah otonom
 - b. hak otonom
 - c. otonomi
 - d. otonomi daerah

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Peraturan daerah termasuk kebijakan publik. Artinya, peraturan daerah tersebut menyangkut dan diperuntukkan untuk

2. Kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan oleh daerah ... dan
3. Kebijakan publik yang diambil pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dari
4. Praktik-praktik KKN yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah apabila tidak disikapi oleh aparat penegak hukum, hanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu yang mementingkan kepentingan
5. Kebijakan publik diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan warga secara
6. Memberikan dorongan moral kepada peserta sidang yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan termasuk respons masyarakat yang
7. Ciri masyarakat yang mandiri pada masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak mau tergantung pada
8. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” merupakan bunyi UUD 1945 pasal
9. Orang yang bersikap antisipatif terhadap peraturan akan memikirkan cara agar tidak terkena ... peraturan tersebut.
10. Musyawarah merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila khususnya sila

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Mengapa kita perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik?
2. Berilah tiga contoh kebijakan yang dibuat oleh orang tua di lingkungan keluarga!
3. Sebutkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah!
4. Sebutkan konsekuensi tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik!
5. Sebutkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah!

Selamat belajar!

Ulangan Semester I

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Deskripsikan secara singkat unsur pokok terbentuknya negara!
2. Apakah perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan?
3. Deskripsikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban membela negara!
4. Deskripsikan komponen-komponen sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagai usaha pembelaan negara!
5. Apa sajakah wujud partisipasi warga dalam pembelaan negara di lingkungan sekolah?
6. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
7. Jelaskan asas-asas otonomi daerah!
8. Deskripsikan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah!
9. Apakah tujuan pembuatan kebijakan publik?
10. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan masyarakat tidak aktif dalam kebijakan publik?
11. Sebutkan dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik!
12. Jelaskan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik!
13. Apakah yang dimaksud masyarakat madani?
14. Bagaimanakah respons atau tanggapan masyarakat ketika kebijakan publik dikeluarkan?
15. Berilah contoh peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah!

B. Bacalah wacana berikut!

Sukses Pilkada Jadi Tugas Pokok Penjabat Walikota

Penjabat Walikota Solo Drs Anwar Cholil, Rabu (11/5), menegaskan salah satu tugas pokok dari kedudukannya sebagai pejabat sementara walikota adalah mengawal dan mendorong

pelaksanaan Pilkada sehingga bisa berjalan sukses dan lancar. “Kedudukan saya sebagai Penjabat Walikota mempunyai dua tugas pokok. Pertama, memastikan agar pemerintahan kota tetap berjalan dan kedua mengawal serta mendorong pelaksanaan Pilkada yang sukses dan lancar, “ kata Anwar Cholil saat bertamu di Kantor Harian Umum SOLOPOS, Griya Solopos, Jl Adisucipto 190 Solo.

Anwar yang datang dengan didampingi Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (BIK), Drs Purnomo Subagyo dan sejumlah staf Pemkot, sengaja mengunjungi sejumlah media di Solo untuk menjalin silaturahmi.

Di harian umum SOLOPOS, rombongan Penjabat Walikota segenap pimpinan SOLOPOS yang dipimpin Pemimpin Redaksi SOLOPOS Dani H Soe’oed.

Pada pertemuan itu yang terlihat akrab, Anwar juga menegaskan tentang posisi PNS yang netral dalam Pilkada. Pihaknya juga meminta SOLOPOS untuk menjadi bagian dari sukses Pilkada, termasuk memantau netralitas PNS.

“Dalam waktu dekat Pemkot akan merumuskan tentang bagaimana netralitas PNS bersama-sama dengan Panwaskot. Karena saya khawatir kalau itu tidak jelas, akan terjadi kebingungan di kalangan masyarakat,” kata Anwar.

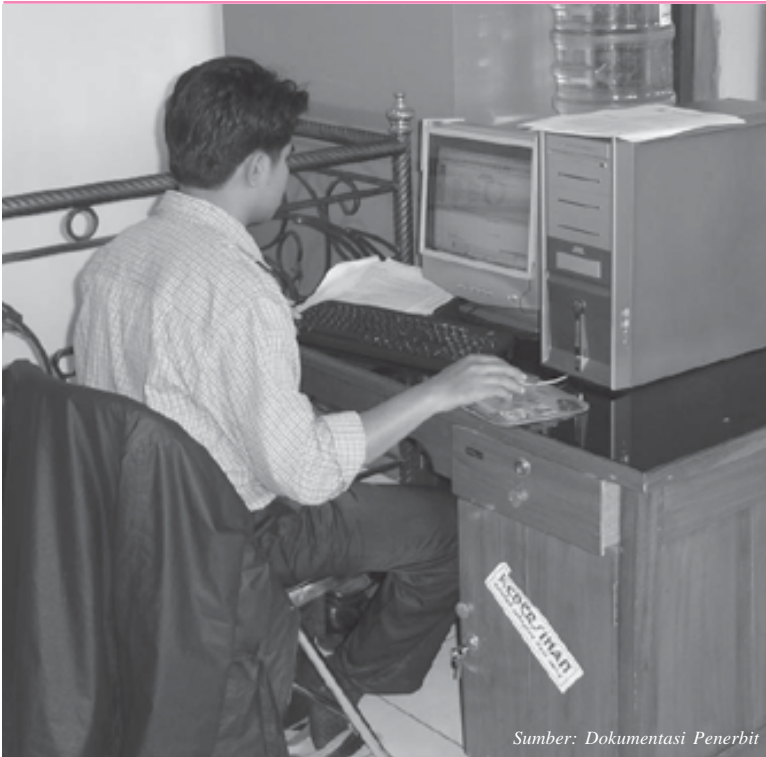
Sementara itu Pemimpin Redaksi SOLOPOS Dani H Soe’oed mengatakan perlunya komunikasi yang efektif antara SOLOPOS dengan Pemkot sehingga ke depan tidak terjadi kesalahpahaman. Dani juga mendukung langkah Pemkot untuk menyelesaikan Pilkada melalui pemberitaan yang kritis dan tidak memihak.

Setelah membaca dan memahami wacana di atas, coba jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimanakah peran media dalam komunikasi politik terhadap masyarakat?
2. Menurut pendapatmu bagaimanakah pelaksanaan Pilkada yang baik?
3. Menurut pendapatmu bagaimanakah posisi PNS dalam Pilkada?
4. Bagaimanakah cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari masalah di atas?
5. Bagaimanakah tindakanmu sebagai warga negara yang baik untuk menyelesaikan Pilkada?

Bab 3

Dampak Globalisasi



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Pada saat ini semua bangsa sedang berada di tengah era globalisasi, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha untuk mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan negara lain dalam persaingan di era globalisasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat maupun sektor-sektor lain.

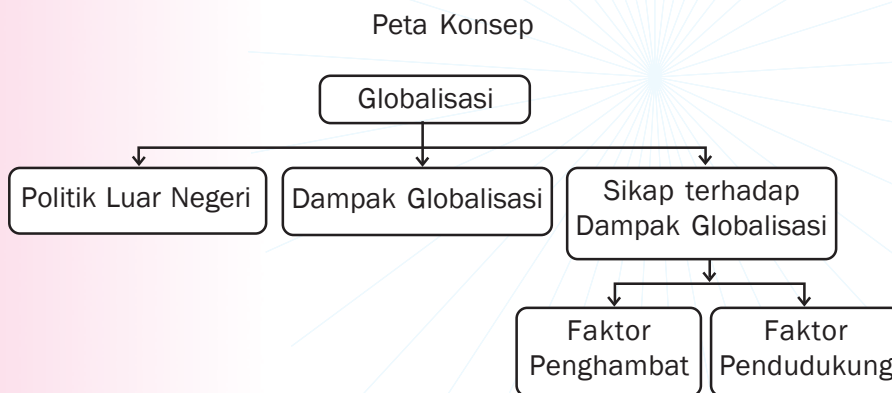
Pendahuluan

Selamat berjumpa dengan bab yang ketiga.

Dalam bab ini, kita akan membahas tentang dampak globalisasi yang diawali dengan arti penting globalisasi, dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap terhadap dampak globalisasi. Sebelum kami bahas satu per satu, apakah kalian mengetahui maksud globalisasi dan arti pentingnya?

Materi dalam bab ini sangat penting untuk kalian pelajari. Sebab setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dan arti penting globalisasi, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, mampu mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu menentukan sikap terhadap dampak globalisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bab ini kami lengkapi dengan peta konsep untuk memperjelas materi sehingga memudahkan kalian untuk mempelajarinya.



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi dalam bab ini dibagi menjadi empat subbab.

Subbab A Pengertian dan Arti Penting Globalisasi

Subbab B Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Subbab C Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Subbab D Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Pelajarilah bab ini secara bertahap dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jika perlu baca berulang-ulang serta catat kata-kata yang dianggap penting. Kerjakan setiap tugas pada tiap uji kompetensi untuk menilai kemampuan kalian berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari.

A. Pengertian dan Arti Penting Globalisasi

Sejak perang dingin antara Blok Barat (Amerika–Eropa) dan Blok Timur (Uni Soviet) berakhir pada tahun 1980-an, lahir suatu era kesadaran di antara negara-negara di dunia untuk hidup berdampingan secara damai dalam suatu dunia yang saling membutuhkan dan menghargai.

Berakhirnya perang dingin inilah yang menandai dimulainya era globalisasi dalam tata kehidupan umat manusia di dunia. Dalam era globalisasi, sistem perlombaan senjata dan kekuatan militer diganti dengan sistem kerja sama bidang ekonomi–perdagangan, era industri berkembang menjadi era informasi, muncul gerakan-gerakan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, serta terjadi peningkatan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan ikut memikirkan keselamatan dan masa depan umat manusia. Itulah berbagai hal yang berkaitan dengan globalisasi.

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi berarti meluasnya pengaruh kebudayaan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu.

Globalisasi merupakan suatu keadaan yang bersifat mendunia. Hal itu dikarenakan kehidupan manusia dimotivasi oleh kesadaran hidup dalam suatu bumi atau dunia. Oleh karena itu, setiap manusia yang hidup dalam era globalisasi harus memiliki wawasan global. Wawasan global adalah suatu keadaan yang bertolak dari anggapan bahwa saat sekarang telah terjadi keadaan yang saling ketergantungan (*interdependensi*) di antara bangsa-bangsa dan penduduk di dunia, terdapatnya kesamaan dalam kebutuhan dan perhatian di antara penduduk dunia, serta terdapat perbedaan dan persamaan di antara individu-individu dalam masyarakat dunia. Terjadinya perkembangan bidang transportasi–komunikasi–perekonomian yang bersifat global dari kebutuhan untuk melihat berbagai isu dan kejadian dalam konteks global.

Dengan demikian, globalisasi adalah suatu himpunan atau kelompok proses global dari berbagai jenis objek yang melibatkan berbagai bidang aktivitas manusia. Objek ini dapat berupa objek fisik atau objek nonfisik sehingga proses globalisasi

akan berbeda-beda. Selain itu, globalisasi juga akan memberikan prospektif baru tentang konsep dunia tanpa batas yang akan memengaruhi kehidupan.

Menurut **Selo Sumardjan**, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Globalisasi merupakan kecenderungan untuk menyatu dengan dunia terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi.

2. Proses Globalisasi

Globalisasi membuat mobilitas manusia semakin tinggi karena manusia bebas untuk berkomunikasi dengan siapa pun dan dapat melakukan perjalanan ke negara mana pun yang diinginkan. Keadaan inilah yang menjadikan dunia semakin tidak mengenal batas.

Proses globalisasi merupakan kondisi dinamis yang mendorong kehidupan manusia ke dalam kehidupan wawasan global. Wawasan global muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang ditandai adanya teknologi satelit, telepon, dan internet. Perkembangan transportasi yang ditandai dengan adanya alat transportasi modern. Perkembangan perekonomian yang ditandai dengan adanya pasar bebas.

Proses globalisasi ini akan terus berlanjut karena didukung oleh saluran-saluran globalisasi. Saluran globalisasi yang dapat mendukung proses globalisasi adalah sebagai berikut.

a. Sistem Komunikasi dan Transportasi

Sistem komunikasi di era globalisasi dilakukan melalui satelit sehingga mempermudah setiap orang berhubungan dengan orang lain di berbagai tempat. Era globalisasi pun memengaruhi bidang transportasi. Sistem transportasi dilakukan melalui alat transportasi modern, cepat, dan lancar seperti pesawat terbang.



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 3.1 Sistem transportasi yang modern, cepat, dan lancar merupakan faktor pendukung proses globalisasi.

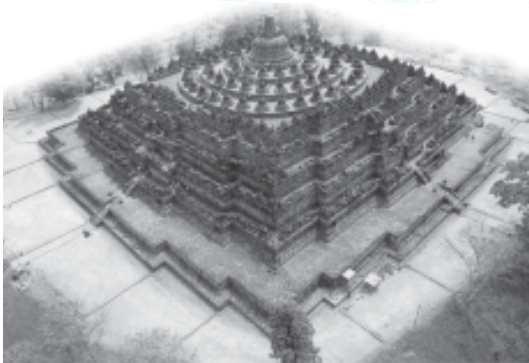
Kemajuan sistem komunikasi dan transportasi yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperlancar proses globalisasi sehingga batasan wilayah negara tidak begitu penting lagi.

b. Perdagangan Internasional

Sebagai saluran proses globalisasi, perdagangan dan industri di dunia melahirkan sebuah era baru, yaitu era pasar bebas. Era pasar bebas ini banyak dimanfaatkan oleh negara-negara untuk melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Setiap kebijakan ekonomi dari negara-negara di dunia akan mendorong kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional.

Era pasar bebas menandai kebebasan kontak perdagangan antarnegara dengan dilandasi prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tanpa adanya hambatan batas wilayah atau peraturan dari negara yang dapat merugikan sistem perdagangan. Namun, tetap dengan aturan hukum tertentu.

c. Pariwisata Internasional



Sumber: Ensiklopedia Geografi

Gambar 3.2 Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk mendatangkan devisa.

Dunia pariwisata merupakan sektor potensial untuk mendatangkan devisa. Oleh karena itu, setiap negara ingin memajukan dunia pariwisata. Dengan kemajuan pariwisata, globalisasi dapat berjalan dengan lancar.

Perkembangan pariwisata ditandai dengan digalinya potensi pariwisata alam dan lingkungan serta budaya, pemandangan fasilitas komunikasi dan transportasi. Semua perkembangan pariwisata dimaksudkan agar dapat menarik wisatawan asing sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, pariwisata telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk pergi ke mana pun tanpa harus dibatasi letak geografi.

d. Migrasi Internasional

Migrasi atau perpindahan penduduk juga merupakan saluran proses globalisasi. Proses globalisasi melalui migrasi dapat terjadi karena peperangan, bencana alam, tekanan politik, perbedaan ideologi, atau pekerjaan.

Orang yang memiliki keahlian tinggi cenderung akan bekerja di negara maju dan modern. Ada juga orang yang tidak terampil mencari pekerjaan di negara yang membutuhkan tenaga kerja murah. Oleh karena itu, setiap negara harus membuka batas-batas negaranya terhadap tenaga kerja asing di negaranya.

e. Kerja Sama Antarnegara

Dalam globalisasi, tidak ada satu negara pun yang dapat hidup tanpa kerja sama dengan negara lain. Kerja sama antarnegara sudah menjadi suatu kebutuhan karena antarnegara akan saling mencukupi kebutuhan antar-negara.



Sumber: cambodsha-botschaft.de.

Gambar 3.3 Setiap negara memerlukan kerja sama dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhan.

Kerja sama antarnegara sangat memungkinkan terjadinya pertukaran budaya yang dapat menembus batas-batas wilayah atau geografi suatu negara.

f. Media Massa

Keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik memegang peranan penting dalam proses globalisasi. Dapat dikatakan bahwa media massa merupakan saluran utama dalam proses globalisasi. Informasi dan berita dari media massa mampu memengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan mengubah perilaku masyarakat.



Sumber: Suara Merdeka

Gambar 3.4 Media massa sebagai saluran utama dalam proses globalisasi.

Dengan media massa, kita dapat memperoleh pengetahuan dan pendidikan sehingga wawasan kita semakin bertambah luas.

3. Arti Penting Globalisasi

Era globalisasi harus dipandang dalam kerangka berpikir yang objektif. Artinya, terjadinya globalisasi akan memberikan dua pengaruh, yaitu aspek positif dan negatif. Bentuk aspek positif yang dapat kita terima dengan jiwa besar dan terbuka seluas-luasnya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa adalah sebagai berikut:

- a. etos kerja;
- b. disiplin yang kuat;
- c. pola pikir yang rasional (logika);
- d. optimis dan berorientasi ke masa depan;
- e. persamaan hak dan kesejajaran;
- f. prestasi dan kehidupan yang makmur;
- g. efisiensi dan produktivitas;
- h. kemandirian;
- i. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bentuk-bentuk aspek positif di atas dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manfaat dari bentuk aspek positif di atas, antara lain sebagai berikut.

- a. mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan seseorang;
- b. mempercepat manusia untuk berhubungan dengan sesama;
- c. meningkatkan efisiensi;
- d. mengubah pola hidup manusia dari tradisional menjadi modern;
- e. membuat manusia dapat menemukan, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan sebaik-baiknya.

Sebaliknya, globalisasi juga akan memberikan aspek negatif bagi manusia. Bentuk aspek negatif dari globalisasi adalah sebagai berikut:

- a. masuknya ideologi yang tidak sesuai seperti komunisme dan ateisme;
- b. pengaruh radikalisme dan terorisme;
- c. adanya sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme;
- d. maraknya narkoba, obat bius, minuman keras, dan alkohol;
- e. maraknya seks bebas dan pornografi;
- f. meningkatnya sikap konsumerisme dan hedonisme.

Seperti halnya aspek positif, aspek negatif juga akan memberikan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Aspek negatifnya adalah sebagai berikut:

- hilangnya nilai dan tradisi asli bangsa karena masuknya budaya luar;
- terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran;
- bergesernya nilai-nilai sosial masyarakat;
- munculnya dehumanisasi, yaitu kurangnya penghargaan terhadap derajat manusia;
- hilangnya tenaga kerja di bidang agraris karena banyaknya industri.

Sebagai gambaran singkat, globalisasi dapat mengubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup inilah yang dinilai sebagai sisi negatif dari globalisasi karena munculnya kemerosotan nilai moral sehingga berakibat terjadinya guncangan budaya dan ketimpangan budaya.



Sumber: Suara Merdeka

Guncangan budaya adalah kondisi jiwa yang tertekan akibat ketidak-

Gambar 3.5 Perubahan gaya hidup masyarakat merupakan salah satu dampak globalisasi.

mampuan seseorang atau kelompok sosial dalam menyesuaikan nilai budaya baru yang masuk dan berkembang dengan pesat. Contohnya, kehidupan keluarga pada masa dahulu meskipun penghasilannya tidak besar tetapi mereka hidup bahagia karena semua kebutuhannya tercukupi sedangkan kehidupan keluarga pada masa sekarang dengan penghasilan yang memadai sering kali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ketimpangan budaya adalah ketertinggalan perkembangan unsur budaya dan unsur budaya lainnya. Ketimpangan budaya ini juga dapat terjadi karena perbedaan nilai baru yang memberikan wujud berbeda.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apa pun bentuk globalisasi yang masuk ke suatu negara, akan memberikan dua pengaruh, yaitu positif dan negatif. Dengan demikian, kita harus memilih dengan sebaik-baiknya, yaitu menerima aspek positif sesuai dengan nilai budaya dan menghindari aspek negatif yang akan menghancurkan kehidupan bangsa.

Setelah kalian mempelajari tentang pengertian dan arti penting globalisasi, tentu saja kalian sudah paham berkaitan dengan materi yang kami sajikan. Untuk itu kerjakan soal-soal berikut untuk menguji kemampuanmu!



Uji Kompetensi

1. Buatlah pengertian globalisasi serta arti penting globalisasi dengan kalimat sendiri. Kemudian diskusikan dengan temanmu dan buatlah kesimpulan hasil diskusi!
2. Deskripsikan aspek-aspek yang mendukung terjadinya proses globalisasi di berbagai bidang!
3. Era globalisasi tentu saja akan membawa pengaruh baik positif maupun negatif. Sebutkan pengaruh tersebut dalam kehidupan sehari-hari!
4. Perdagangan Internasional merupakan salah satu saluran pendukung proses globalisasi. Adakah dampak dari perdagangan Internasional tersebut? Diskripsikan secara singkat!
5. Hal-hal apa sajakah yang kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini?

B. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Bangsa Indonesia seperti telah kita ketahui bersama terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di dalam suku-suku bangsa terdiri atas kelompok masyarakat, dan di antara kelompok masyarakat ada keluarga. Selanjutnya pada lapisan yang paling kecil ada individu-individu atau perorangan yang diberi akal budi oleh Tuhan untuk saling mengenal dan mengasihi.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berhubungan untuk bekerja sama ataupun untuk saling berkomunikasi. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan sehingga terjalin kerja sama, saling menolong, mendukung, mengembangkan, dan membangun untuk kepentingan bersama.

Untuk mempertahankan hidup serta mengatasi masalah, manusia dapat melaluinya jika bekerja sama dengan manusia lainnya. Manusia akan memiliki arti dan bermartabat jika manusia dapat bekerja sama dengan manusia lainnya.

Dalam pergaulan hidup bernegara pun, suatu negara membutuhkan negara lain untuk saling bekerja sama. Kerja sama yang terjalin antarnegara mempunyai maksud untuk terlibat dalam pergaulan internasional. Di samping itu, juga untuk saling menyejahterakan rakyat, kerukunan, dan kedamaian dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara merdeka dan berdaulat juga mempunyai hubungan antarnegara untuk tujuan bersama yang adil dan damai. Hubungan tersebut dikembangkan melalui kebijaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri yang dikembangkan merupakan kebijaksanaan pemerintah. Politik yang dijalankan bertujuan untuk kepentingan nasional dalam berhubungan dengan negara lain di dunia.

Politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan yang kuat karena berdasarkan falsafah Pancasila.

Pada pelaksanaannya, politik luar negeri kita menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Makna semboyan “bebas” dalam arti bangsa Indonesia:

1. memilih untuk berhubungan dengan bangsa manapun di dunia tanpa membedakan sistem pemerintahan dan ideologinya;
2. tidak terlibat dalam persekutuan militer atau pakta pertahanan mana pun;
3. tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain;
4. memberi dan menerima bantuan atau pertolongan dalam arti tidak boleh mengabaikan kedaulatan masing-masing negara.

Makna “aktif” adalah selalu berperan serta secara aktif dalam mengusahakan perdamaian dan keseimbangan dunia.

Landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan idiil, landasan struktural, dan landasan operasional. Adapun penjelasan secara sederhana dari landasan itu adalah sebagai berikut.

1. Landasan idiil adalah Pancasila, khususnya dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea I dan IV, serta dalam Batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3; pasal 13 ayat 1, 2, dan 3.
3. Landasan operasional adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan Ketetapan MPR tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004–2009.

1. Peranan Politik Luar Negeri Melalui Perwakilan

Pemerintah di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu seorang Wakil Presiden bersama Menteri-Menteri dalam kabinetnya.

Untuk menjalin hubungan internasional dengan negara-negara sahabat, Presiden memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri. Presiden dan Menteri Luar negeri memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan antarnegara. Dalam hukum dan tata cara nasional maupun internasional, hal itu sudah berlaku umum dan sewajarnya. Akan tetapi, karena tugas Presiden dan Menteri juga sangat banyak, maka hal itu tidak dapat dikerjakan sendiri.

Untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan hubungan internasional, pemerintah membentuk perwakilan. Tugas perwakilan adalah mewakili pemerintah untuk kepentingan nasional. Juga tugas yang berkaitan dengan kerja sama dengan negara di tempat perwakilan itu ditempatkan.

Pemerintah membentuk perwakilan-perwakilan di negara sahabat. Bentuk-bentuk perwakilan yang dibentuk antara lain sebagai berikut.

a. Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri adalah departemen yang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri. Departemen ini bertanggung jawab atas hubungan negara kita dengan negara lain dan organisasi internasional. Departemen Luar Negeri memiliki fungsi eksekutif, yaitu menjabarkan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, serta menjalin dan mengelola hubungan internasional.

b. Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah wakil pemerintah yang ditugaskan untuk mengurus kepentingan negara. Perwakilan diplomatik biasanya ditempatkan di negara sahabat atau organisasi internasional secara permanen atau menetap. Perwakilan misi diplomatik terdiri atas duta besar, duta dan kuasa usaha, dan atase.

1) Tugas Perwakilan Diplomatik

Tugas perwakilan diplomatik, antara lain sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan hubungan dengan negara atau pemerintah lain.

- b) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.
 - c) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
 - d) Bertindak sebagai pencatat sipil dan pemberian paspor.
- 2) Fungsi Perwakilan Diplomatik
- Fungsi perwakilan diplomatik, antara lain sebagai berikut.
- a) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 - b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas hukum yang berlaku secara internasional.
 - c) Bertugas melakukan perundingan dan kerja sama dengan pemerintah negara penerima.
 - d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan yang terjadi di negara penerima sesuai batas peraturan internasional, kemudian melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
 - e) Berusaha meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, serta mengembangkan hubungan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- 3) Peranan Perwakilan Diplomatik
- Dalam membina hubungan internasional diperlukan taktik dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Hal ini dilakukan agar kepentingan suatu negara dapat diperkenalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Jadi, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut.
- a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan nasional.
 - b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.
 - c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.
 - d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.

4) Perangkat Perwakilan Diplomatik

Untuk melaksanakan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat sebagai berikut.

a) Duta Besar Berkuasa Penuh

Duta besar berkuasa penuh adalah perwakilan diplomatik yang berada pada tingkat tertinggi. Perwakilan pada tingkat ini mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa untuk menjalin hubungan timbal balik dengan negara penerima.

b) Duta

Kedudukan duta lebih rendah daripada duta besar berkuasa penuh. Untuk menyelesaikan suatu persoalan, pejabat duta harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.

c) Kuasa Usaha

Kuasa usaha adalah pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Kuasa usaha bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau berhalangan menjalankan tugasnya.

d) Atase-atase

Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian seperti berikut.

(1) Atase Pertahanan

Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira TNI yang diberbantukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di kantor kedutaan besar. Tugas atase adalah memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.

(2) Atase Teknis

Atase teknis dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta besar. Atase teknis berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya, atase perdagangan, atase pendidikan dan kebudayaan, dan atase perindustrian.

c. Perwakilan Nonpolitis

Perwakilan nonpolitis adalah perwakilan suatu negara yang diwakili oleh korps konsuler. Di dalam menjalankan tugasnya, korps konsuler terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut.

1) Konsul Jenderal

Konsul jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat dia bertugas.

2) Konsul dan Wakil Konsul

Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang disertai pimpinan konsuler.

3) Agen Konsul

Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.

Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, antara lain meliputi bidang ekonomi, seperti menggalakkan ekspor komoditas nonmigas dan promosi perdagangan. Dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar-menukar pelajar, mahasiswa, misi kebudayaan, dan pelayanan pariwisata.

2. Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional

Dalam pergaulan di dunia internasional, Indonesia selalu membina dan meningkatkan persahabatan dengan negara lain. Hubungan tersebut tentunya harus saling menguntungkan untuk kepentingan masing-masing.



Sumber: www.nhandan.com

Gambar 3.6 ASEAN merupakan salah satu bentuk persahabatan Indonesia dengan negara lain.

Dengan menganut sistem politik bebas dan aktif, tentunya Indonesia selalu menjalin dan memelihara persahabatan dengan negara-negara lain. Apalagi konsep dasar politik luar negeri kita adalah Politik Damai yang berarti bahwa negara kita dalam menjalin hubungan dengan negara lain mengutamakan persahabatan dan kerja sama secara damai dan saling menguntungkan.

Seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, Indonesia senantiasa ikut aktif dalam pergaulan internasional. Indonesia juga telah menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini berarti Indonesia telah menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, Indonesia juga telah berperan serta di percaturan dunia internasional. Peranan Indonesia di percaturan dunia internasional, antara lain sebagai berikut.

1. Berperan serta dengan mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara yang mengalami konflik seperti ke Timur Tengah, Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia Herzegovina, dan memfasilitasi perdamaian di Filipina.



Sumber: www.asean.sec.org

Gambar 3.7 Peran serta Indonesia dalam ASEAN.

2. Menyelenggarakan konferensi negara-negara Asia-Afrika untuk menyerukan ketidaksetujuan terhadap penjajahan di atas dunia dan memberi hak kepada setiap bangsa-bangsa untuk merdeka.

3. Mendirikan Gerakan Non-Blok bersama dengan negara-negara lain, untuk ikut meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.
4. Indonesia ikut memelopori berdirinya ASEAN bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.
5. Secara konsisten menyerukan kepada dunia internasional untuk mewujudkan dunia yang aman dari senjata pemusnah massal seperti nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis.
6. Menentang adanya kolonialisme, imperialisme, serta teroris internasional.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pergaulan hidup bernegara, Indonesia membutuhkan negara lain untuk bekerja sama dalam pergaulan internasional.

Dalam hubungan tersebut dikembangkan melalui kebijaksanaan politik luar negeri. Politik yang dijalankan bertujuan untuk kepentingan nasional dalam berhubungan dengan negara lain di dunia.

Setelah mempelajari materi di atas, tentunya kalian memahami materi tersebut dengan baik. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi di atas, kerjakan uji kompetensi berikut!



Uji Kompetensi

1. Departemen apakah yang menjalankan politik luar negeri negara kita? Apa nama perwakilan negara kita di negara sahabat? Apa nama kantor perwakilan tersebut? Apa tugas-tugas perwakilan negara kita di luar negeri? Diskusikan dengan kelompok kalian!
2. Buatlah skema urutan perwakilan diplomatik satu negara dari yang tertinggi hingga yang terendah!
3. Buatlah daftar peran serta Indonesia di percaturan dunia Internasional selain yang telah disebutkan di atas! Sebutkan peran serta tersebut dan berilah penjelasan!

C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Bidang Politik

Tahukah kamu dampak adanya globalisasi dalam kehidupan? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Simak dengan baik penjelasan berikut! Dampak globalisasi di bidang politik, antara lain sebagai berikut.

- a. Penyebaran nilai-nilai politik Barat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 3.8 Demonstrasi salah satu dampak globalisasi di bidang politik.

unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum.

- b. Semakin lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong-royong.
- c. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas.
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (jabatan-jabatan publik) semakin mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
- e. Semakin banyak partai politik, organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi sponsor kepentingan tertentu dengan menyuarakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokratisasi, dan lingkungan.

2. Bidang Ekonomi

Dampak globalisasi di bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut.



Sumber: www.bath.ac.uk

Gambar 3.9 Kompetisi produk merupakan dampak globalisasi di bidang ekonomi.

- a. Bagi orang yang memiliki modal besar akan semakin kuat dan orang yang lemah semakin tersingkir dan terjatuh.
- b. Pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
- c. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya sudah semakin ditinggalkan.
- d. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.

3. Sosial dan Budaya

Globalisasi juga berdampak dalam kehidupan sosial budaya. Berkat globalisasi, banyak nilai-nilai kehidupan dari bangsa lain masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Dampak globalisasi di bidang sosial budaya, antara lain sebagai berikut.

- a. Mudahnya nilai-nilai Barat masuk baik melalui internet, antena parabola, media televisi, maupun media cetak yang kadang-kadang ditiru habis-habisan. Sebagai contoh, mode pakaian dan tatanan rambut remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi nilai kesopanan telah berubah mengikuti mode dunia. Begitu pula dandanan anak muda sekarang, banyak anak laki-laki memakai perhiasan wanita atau sebaliknya.
- b. Semakin mudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualistis (kepentingan diri sendiri), pragmatisme (yang menguntungkan), hedonisme (kenikmatan sesaat), permisif (membiarkan yang dianggap tabu), dan konsumerisme (lebih senang memakai daripada membuat). Sebagai contoh, fenomena anak melawan orang tuanya, murid yang berani melawan gurunya, ataupun perkelahian antarpelajar.
- c. Semakin lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu, seperti musibah, kecelakaan, dan sakit hanya ditangani segelintir orang (kurang adanya kebersamaan). Sebagai contoh, jika terjadi musibah atau kecelakaan hanya orang-orang tertentu yang mau membantu.
- d. Semakin mudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh acara-acara keagamaan kurang diminati oleh kawula muda.

4. Hukum Pertahanan dan Keamanan

Dampak globalisasi di bidang hukum pertahanan dan keamanan, antara lain sebagai berikut.

- a. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
- b. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.

- c. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
- d. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional.
- e. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.

Menurut **Anthony Giddens**, dampak globalisasi adalah sebagai berikut.

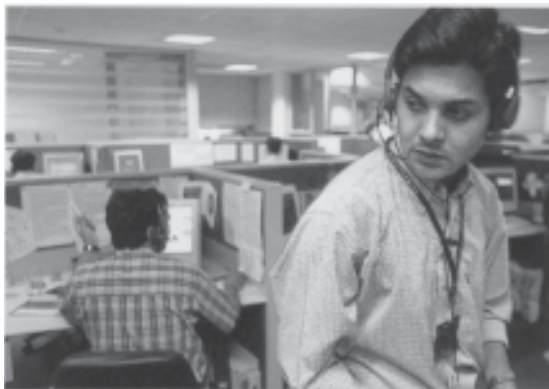
1. Individualisme Meningkat

Sebelum terjadi globalisasi, kesempatan individu untuk menentukan diri sendiri dibatasi oleh lingkungan baik berupa tradisi maupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang membatasinya, yaitu status seseorang dalam masyarakat, jenis kelaminnya, suku, atau bahkan agamanya. Seseorang yang terlahir sebagai anak seorang petani, hampir dapat dipastikan ia akan mempelajari juga keterampilan sebagai petani dan akan menjadi petani selama hidupnya. Dulu identitas pribadi dibentuk dan disesuaikan dengan tuntutan komunitas tempat ia lahir dan dibesarkan. Nilai, gaya hidup, dan penilaian mengenai baik dan buruk dibentuk oleh komunitas dan diajarkan kepada masing-masing individu.

Di era globalisasi ini, kesempatan individu untuk mengatur dan menentukan yang terbaik bagi diri terbuka lebar. Di bawah kondisi globalisasi, kita dihadapkan pada hal yang disebut individualisme baru. Orang secara aktif dan bebas membentuk diri mereka sendiri dan menentukan identitas mereka sendiri. Tradisi dan nilai-nilai masyarakat perlahan-lahan ditinggalkan begitu seseorang bergaul dan berinteraksi dengan tatanan global yang baru. Norma-norma masyarakat yang sebelumnya menjadi pedoman seseorang bertindak laku perlahan-lahan menjadi longgar. Sekarang seorang anak petani bisa saja menjadi seorang pengusaha atau pekerjaan lainnya. Globalisasi memaksa orang untuk hidup dengan cara yang lebih terbuka dan luwes. Ini berarti bahwa kita terus-menerus menjawab dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah di sekitar kita.

2. Pola Kerja

Kerja merupakan pusat kehidupan banyak orang dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Globalisasi membawa perubahan yang mendalam dalam dunia kerja. Pola perdagangan internasional yang baru dan kecenderungan ke arah ekonomi berbasis pengetahuan mempunyai dampak yang luar biasa besar bagi pekerjaan.



Sumber: Ensiklopedia Geografi

Gambar 3.10 Dengan adanya globalisasi seseorang lebih memilih pekerjaan paruh waktu yang lebih fleksibel.

Perdagangan global dan berbagai bentuk teknologi baru memiliki dampak yang besar bagi pabrik-pabrik tradisional, begitu juga para pekerja industri dibiarkan menganggur dan tanpa keterampilan memadai untuk masuk ke era perekonomian berbasis pengetahuan.

Kalau dulu orang bekerja seumur hidup di satu majikan saja, dewasa ini orang memiliki banyak kesempatan untuk berganti-ganti pekerjaan selama hidupnya sesuai keinginannya. Hal ini pula berarti mereka memiliki kesempatan lebih banyak untuk menambah keterampilan dan kemampuan baru yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Kalau dulu, uang (gaji yang tinggi) bukan lagi satu-satunya kriteria tempat kerja yang baik, sekarang orang melihat unsur kepuasan bekerja dan aktualisasi diri sebagai unsur yang sangat menentukan. Banyak orang yang lebih merasa nyaman sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan, sekarang semakin banyak orang merasakannya sebagai belenggu dan karenanya lebih memilih pekerjaan paruh waktu yang lebih fleksibel.

Wanita pun telah masuk ke dunia kerja. Banyak wanita dengan karir bagus tingkat pekerjaan yang sibuk dan menuntut konsentrasi dan energi ekstra, serta kesempatan untuk mendapat pendidikan lanjut, membuat banyak perempuan menunda kehamilan dan bahkan pernikahan. Kalaupun mereka akhirnya memutuskan untuk hamil dan memiliki anak, mereka

tidak akan berlama-lama di rumah bersama bayinya, dan sebaliknya cepat-cepat kembali ke tempat kerja yang menantikan tanggung jawabnya. Hal ini tentu saja membawa perubahan dalam manajemen keluarga, mengasuh anak pada akhirnya menjadi tanggung jawab suami juga, demikian pula pembagian kerja dalam rumah tangga (sehabis kerja).

Konsekuensi lainnya adalah meningkatkan rasa ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ketika pekerjaan dapat dipindahkan dengan mudah dari satu negara ke negara yang lain, sedikit sekali pekerjaan yang aman.

3. Kebudayaan Pop

Dampak kultural globalisasi mendapat perhatian para ahli. Citra, gagasan, dan gaya hidup yang baru menyebar dengan begitu cepat ke seluruh pelosok dunia lebih daripada sebelumnya. Perdagangan, teknologi informasi yang baru, dan migrasi global telah memberi kontribusi bagi penyebaran budaya pop tersebut melintasi batas negara.

Banyak orang percaya bahwa kita sekarang hidup dalam suatu tatanan informasi tunggal, sebuah jaringan global raksasa yang bisa diakses cepat dan dalam jumlah yang banyak.

Globalisasi memiliki konsekuensi-konsekuensi lain bagi dunia secara keseluruhan. Salah satunya adalah homogenitas atau kesamaan yang lebih besar dalam produk-produk yang dijual dan dibeli di seluruh dunia. Lama-kelamaan, kita akan menemukan makanan cepat saji, merek-merek pakaian, musik, dan gaya yang sama di setiap sudut dunia ini. Kesuksesan kapitalisme Barat menjual produk-produk Barat bisa menghasilkan keseragaman di mana-mana. Dalam proses ini, ada ancaman serius terhadap keragaman budaya dunia.

Globalisasi telah memberi pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga pada saat ini tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mampu menghindarkan diri dari pengaruh bangsa lain. Globalisasi telah menciptakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan oleh semua bangsa sehingga pengaruhnya pun tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Globalisasi Teknologi

Bukti globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan di berbagai bidang komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Dengan globalisasi teknologi itu, kita dapat memperoleh informasi, berita, dan pengetahuan dari berbagai penjuru dunia dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi akan memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan pembangunan berbangsa dan bernegara.



Sumber: Ensiklopedia Iptek

Gambar 3.11 Dengan perkembangan teknologi akan memberikan informasi dari berbagai penjuru dunia dalam waktu singkat.

2. Pengaruh Globalisasi Pasar Bebas

Globalisasi dalam bentuk pasar bebas merupakan proses globalisasi di bidang ekonomi. Pasar bebas muncul karena adanya liberalisasi perdagangan antarnegara di dunia. Bukti adanya pengaruh globalisasi pasar bebas adalah makin maraknya perusahaan-perusahaan di negara berkembang ikut serta dalam perdagangan internasional. Akibat positif pengaruh ini adalah runtuhnya hambatan ekonomi nasional yang bersifat tradisional.

3. Pengaruh Globalisasi Budaya

Perkembangan teknologi dalam bentuk komunikasi dan informasi yang tiada henti menimbulkan kontak budaya yang tidak dapat dihindari. Setiap negara harus memiliki kesadaran tinggi bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap terjadinya kontak budaya dengan dunia luar. Pengaruh globalisasi budaya hampir terjadi di seluruh unsur budaya. Unsur budaya nasional banyak terpengaruh unsur budaya luar. Namun, ada beberapa unsur yang mampu bertahan seperti organisasi budaya sosial, etika organisasi politik, dan unsur-unsur religi.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya globalisasi akan membawa dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kita harus mampu memilih aspek positif dari dampak globalisasi tersebut.

Ujilah kemampuan kalian dalam memahami materi di atas dengan mengerjakan tugas-tugas berikut! Kalian dapat mengerjakannya dengan berdiskusi kelompok!



Uji Kompetensi

1. Amatilah lingkungan di sekitarmu, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tulislah contoh-contoh aspek globalisasi yang dilakukan orang di sekitarmu!

No.	Tindakan	Makna Globalisasi	Sikap Setuju/Tidak Setuju
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Globalisasi terjadi di berbagai bidang kehidupan. Tuliskan pada kolom di bawah ini dampak globalisasi yang terjadi pada setiap bidang kehidupan disertai contoh atau buktinya!

No.	Bidang	Proses Globalisasi	Bukti Globalisasi
1.	Ilmu Pengetahuan		
2.	Teknologi		
3.	Komunikasi		
4.	Transportasi		
5.	Ekonomi		

D. Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Sudah siapkah kalian menghadapi dampak globalisasi? Sikap-sikap apakah yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi adanya dampak globalisasi? Simak baik-baik penjelasan berikut!

Berdasarkan kenyataan yang ada, era globalisasi pada abad ke- 21 ditandai perubahan dalam segenap aspek kehidupan. Dalam bidang ideologi, kehancuran komunisme di Eropa Timur memungkinkan liberalisme dan kapitalisme mendominasi dunia. Dalam bidang politik, pengaruh negara-negara besar sulit dielakkan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental. Dalam bidang sosial budaya, pola hidup dan budaya hedonisme (maunya enak, senang saja) mewarnai semua lapisan dan lingkungan masyarakat. Dalam bidang pertahanan-keamanan, penguasaan teknologi persenjataan bukan lagi jaminan keamanan, melainkan cenderung menjadi ancaman. Ciri-ciri di atas menandai perubahan di era globalisasi.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Bangsa Indonesia Memasuki Era Globalisasi

Bangsa Indonesia tidak terlepas dari arus globalisasi. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi arus globalisasi. Bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

Agar bangsa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perlu diciptakan suasana atau iklim yang mendukung kita untuk menghadapi arus globalisasi pada abad ke-21. Suasana atau iklim yang mendukung kita untuk menghadapi arus globalisasi, antara lain sebagai berikut.

1) Suasana keterbukaan

Bangsa Indonesia hendaknya tidak menutup diri dari segala apa yang datang dari luar, baik itu kemajuan iptek, pola hidup, pola pikir, dan berbagai konsep yang siap pakai untuk suatu pembaruan. Akan tetapi, keterbukaan ini bukan berarti terbuka selebar-lebarnya, tanpa melalui proses penyaringan. Kita harus terbuka, tetapi tetap harus dapat menyeleksi, mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang tidak.

Suasana keterbukaan juga dimaksudkan terbuka dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun dalam bidang lain. Akan tetapi, tetap dalam kerangka kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

2) Menghargai hasil karya orang lain

Orang akan merasa tertantang untuk melakukan inovasi apabila hasil karyanya dihargai. Hal ini sangat menguntungkan bagi kemajuan hidup kita, sehingga kita tidak selamanya harus mengimpor penemuan-penemuan baru dari negara-negara maju. Untuk itu, iklim demikian perlu kita kembangkan.

3) Meningkatkan pendidikan masyarakat



Sumber: budi.insan.co.id

Gambar 3.12 Peningkatan pendidikan sebagai salah satu usaha menghadapi persaingan di era globalisasi.

Diakui ataupun tidak, pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan daya saing suatu masyarakat atau bangsa. Di era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada persaingan yang sangat tajam. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara akademis maupun secara sosial-emosional. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas ini hanya dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan.

4) Sistem mobilitas sosial terbuka

Dengan sistem mobilitas sosial terbuka, manusia Indonesia memiliki hak yang sama untuk berkembang dan meningkatkan derajat serta martabat hidupnya, tanpa dihalang-halangi. Kondisi seperti ini sangat mendorong bangsa kita untuk berpacu meningkatkan kualitas hidup dirinya, dan ini tentu sangat kondusif (mendukung) untuk meningkatkan daya saing bangsa kita dalam percaturan internasional.

b. Faktor Penghambat

Kalian mungkin merasakan bahwa dalam memasuki era globalisasi masih terdapat beberapa penghambat. Adapun penghambat yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.

1) Suasana ketertutupan

Di tengah-tengah suasana globalisasi, masih ada sekelompok manusia yang menutup diri dari pengaruh luar. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Namun, keterutupan terhadap dunia luar tidak akan membawa kemajuan. Sebaliknya, suasana dan sikap tertutup akan menyebabkan kita tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain. Ingat sejarah Jepang ratusan tahun yang telah silam. Ketika negara itu menutup diri dari pengaruh negara-negara lain, ternyata Jepang menjadi bangsa yang tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Untung Jepang segera sadar dan membuka diri melalui Restorasi Meiji. Akhirnya, sekarang Jepang menjadi negara maju. Berkenaan dengan hal tersebut, kita pun hendaknya jangan menutup dari kemajuan, tetapi harus tetap waspada dari pengaruh negatifnya.

2) Kebergantungan pada pemerintah

Untuk menuju kepada masyarakat modern, diperlukan sikap mandiri segenap rakyat. Akan tetapi, hal itu masih perlu diperjuangkan bangsa Indonesia. Sikap bergantung kepada pemerintah merupakan cermin dari sikap pesimis, hal ini sangat mengganggu bagi kemajuan suatu masyarakat atau bangsa.

3) Berbagai sikap mental yang lemah

Ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih suka main potong kompas, yakni mencapai sesuatu dengan berbagai cara, tanpa peduli cara tersebut dibenarkan atau tidak oleh aturan/undang-undang/hukum/agama. Sikap seperti ini tentu sangat menghambat kemajuan. Selain itu, masih ada sebagian rakyat Indonesia yang mengandalkan orang lain dalam mendapatkan sesuatu. Tidak sedikit pula orang Indonesia yang menggampangkan persoalan dan menilai sesuatu dari mudahnya saja. Orang menghargai sesuatu karena itu langsung punya nilai materi baginya, kalau tidak demikian, orang tidak mau terlibat di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi harus meningkatkan faktor pendukung dan mengurangi faktor penghambat.

2. Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Untuk menghadapi proses globalisasi yang semakin berkembang pesat ini, kita harus memiliki sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap manusia untuk berhati-hati, waspada, memilih, dan memerhatikan semua perkembangan globalisasi yang berakibat pada perubahan kehidupan. Sikap selektif harus kita lakukan terhadap globalisasi, baik aspek positif maupun negatif. Kita dapat menerima aspek positif dengan terbuka. Globalisasi bukan merupakan pilihan, melainkan kenyataan. Globalisasi juga bukan merupakan opsi yang dapat dipertimbangkan, melainkan realitas yang mau tidak mau harus dihadapi.

Di era globalisasi, kita dituntut untuk bekerja sama dan sekaligus bersaing dengan negara dan bangsa lain. Dalam menghadapi perkembangan yang demikian inilah, kita harus mulai dengan membebaskan diri dari mentalitas “katak dalam tempurung”. Namun, kita juga harus tetap selektif memilih aspek positif yang sesuai dengan nilai dan jati diri bangsa yang bersangkutan.

Sikap selektif pun harus kita lakukan juga ketika menghadapi aspek negatif dari globalisasi. Selektif yang dimaksud adalah sesuai dengan nilai-nilai ideologi, sosio-kultur, ataupun agama di masyarakat kita. Kita harus berusaha keras untuk menghindari dan tidak menerima semua aspek globalisasi tersebut. Globalisasi merupakan sesuatu yang baik karena mendorong kita untuk berkembang maju, namun jangan sampai globalisasi justru akan memperburuk kehidupan kita. Kita harus bersikap aktif menyeleksi semua proses globalisasi yang masuk.

Beberapa bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi, antara lain sebagai berikut:

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
- c. meningkatkan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing;
- f. meningkatkan penguasaan teknologi modern;
- g. meningkatkan kinerja dan etos kerja yang tinggi.

3. Menentukan Sikap terhadap Globalisasi

Pada saat ini semua bangsa sedang berada di tengah era globalisasi, tak terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha untuk mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan negara lain dalam persaingan di era globalisasi ini. Contoh sikap bangsa Indonesia di era globalisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta hukum adalah sebagai berikut.

a. Bidang Politik

Sikap bangsa Indonesia di bidang politik, misalnya

- 1) menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik;
- 2) meningkatkan hubungan dan kerja sama internasional;
- 3) berpartisipasi aktif dalam percaturan politik dunia untuk perdamaian.

b. Bidang Ekonomi

Sikap bangsa Indonesia di bidang ekonomi, misalnya

- 1) meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa untuk bersaing secara internasional;
- 2) meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar bebas;
- 3) meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.



Sumber: Ensiklopedi Indonesia

Gambar 3.13 Meningkatkan mutu produksi sebagai salah satu usaha menghadapi era globalisasi.

c. Bidang Budaya

Sikap bangsa Indonesia di bidang sosial dan budaya, misalnya

- 1) berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, seperti PMI;
- 2) pelestarian kegiatan-kegiatan sosial budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat;
- 3) mengadakan pertukaran pelajar antarnegara.

d. Bidang Hukum

Sikap bangsa Indonesia di bidang hukum, misalnya

- 1) mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional;
- 2) ikut serta meratifikasi perjanjian hukum internasional;
- 3) melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia;
- 4) menghormati mahkamah internasional dan peradilan internasional.

Di era globalisasi, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terutama teknologi komunikasi dan telekomunikasi sudah sedemikian rupa sehingga tidak dikenal lagi batas wilayah dan teritorial. Hal itu berakibat lalu lalang informasi dan budaya antarbangsa tidak bisa dibendung dan sampai di hadapan kita, sudah begitu cepatnya sehingga sulit untuk dapat dielakkan. Pada situasi demikian maka ketahanan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan mutlak dilakukan. Begitu pula upaya memilih mana yang sesuai dengan budaya kita dan mana yang tidak, harus dilakukan filter utama yang dijadikan pedoman dalam menyaring itu semua. Filter utama tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang luhur.

Pada sisi lain, kita perlu melakukan upaya-upaya penangkal-an terhadap pengaruh buruk dari derasnya arus masuk budaya yang merusak nilai-nilai dan moral bangsa, terutama generasi muda baik yang datang melalui media massa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh kemauan mengendalikan diri.

Dalam kaitan inilah kita perlu mengembangkan dan meningkatkan nilai-nilai dan sikap arif bijaksana, yang meliputi: kecerdasan mengambil hanya hal-hal yang bermanfaat, kepekaan terhadap pengaruh yang buruk, teliti dan penuh perhitungan akan akibat yang mungkin timbul, serta bertanggung jawab dalam menerapkannya pada kehidupan. Selain itu, juga nilai-nilai berpikir matang, dinamis, berkemauan keras, kreatif, serta percaya diri.

Dalam kondisi seperti itu, hanya orang, masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki kualitas sajalah yang berpeluang memenangkan persaingan. Kunci untuk mencapai hal itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh teguhnya pendirian, loyal pada bangsa dan negara, terikat pada tekad berani mengambil risiko, berdisiplin, bertanggung jawab, dinamis, dan berkemauan keras, cinta pada tugas, dan semua itu dilakukannya sebagai wujud cinta pada tanah air.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi diperlukan sikap selektif baik aspek positif maupun negatif yang disesuaikan dengan nilai dan jati diri bangsa.

Setelah mempelajari materi tersebut diharapkan kalian memahami sikap-sikap dalam menghadapi era globalisasi dengan baik serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kerjakan soal-soal berikut untuk menguji kemampuanmu!



Uji Kompetensi

1. Amatilah lingkungan di sekitarmu, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tuliskan contoh-contoh aspek positif globalisasi yang dilakukan orang di sekitarmu!

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

2. Sebutkan upaya-upaya penangkal terhadap pengaruh buruk dari dasarnya arus masuk budaya yang merusak nilai-nilai dan moral bangsa terutama generasi muda yang datang melalui media massa maupun ilmu pengetahuan!
3. Sebutkan sikap-sikap bangsa Indonesia di era globalisasi dalam bidang politik!
4. Sebutkan bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi!
5. Menurut pendapatmu, lebih banyak faktor positif atau negatif yang selama ini dirasakan dalam era global?

Penutup

Kegiatan demi kegiatan telah kalian selesaikan dengan baik. Setelah itu kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang arti penting globalisasi, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap terhadap dampak globalisasi.

Pelajaran yang telah kalian pelajari ini kurang bermakna jika tidak ditindaklanjuti dengan pengamalannya. Oleh karena itu, berusahalah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan belajar tersebut.

Rangkuman

1. Globalisasi adalah suatu himpunan atau kelompok proses global dari berbagai jenis objek yang melibatkan berbagai bidang aktivitas manusia.
2. Proses globalisasi merupakan kondisi dinamis yang mendorong kehidupan manusia ke dalam kehidupan wawasan global. Wawasan global muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang ditandai adanya teknologi satelit, telepon, dan internet. Perkembangan transportasi yang ditandai dengan adanya alat transportasi modern. Perkembangan perekonomian yang ditandai dengan adanya pasar bebas.
3. Proses globalisasi akan terus berlangsung karena didukung oleh saluran-saluran globalisasi yang meliputi sistem komunikasi dan transportasi, perdagangan internasional, pariwisata internasional, migrasi internasional, kerja sama antarnegara, dan media massa.
4. Adanya globalisasi mendorong bangsa Indonesia untuk bekerja sama dan menjalin hubungan antarnegara di dunia. Hubungan tersebut dikembangkan melalui kebijaksanaan politik luar negeri. Adapun pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila.
5. Globalisasi membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Perubahan yang menandai dampak globalisasi.
 - a. Bidang ideologi : kehancuran komunisme di Eropa Timur.
 - b. Bidang politik: pengaruh negara-negara besar sulit dielakkan.

- c. Bidang ekonomi: perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental.
- d. Bidang sosial budaya: pola hidup dan budaya hedonisme mewarnai semua lapisan masyarakat.
- 6. Faktor pendukung bangsa Indonesia memasuki era globalisasi.
 - a. Suasana keterbukaan
 - b. Menghargai hasil karya orang lain.
 - c. Sistem mobilisasi sosial terbuka.
 - d. Meningkatnya pendidikan masyarakat.



Kata Kunci

diplomatik	konsul
globalisasi	konsumerisme
goncangan budaya	permisif
hedonisme	politik
individualisme	pragmatis
interdependensi	

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini silakan kerjakan tugas yang telah ada. Jika sudah selesai periksalah bersama teman atau guru kalian. Jika kalian mendapatkan kesulitan mintalah bantuan kepada guru kalian dan kalian disarankan untuk membaca buku sumber lain berkaitan dengan materi.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Peristiwa yang menandai dimulainya era globalisasi dalam tata kehidupan umat manusia di dunia adalah
 - a. perang saudara
 - b. perang dingin
 - c. perang nuklir
 - d. perang mulut
2. Globalisasi berarti
 - a. keadaan yang bersifat mendunia
 - b. kesadaran hidup dalam suatu bumi
 - c. keadaan yang bertolak dari anggapan
 - d. keadaan yang saling ketergantungan

3. Berikut ini saluran globalisasi yang dapat mendukung proses globalisasi, *kecuali*
 - a. sistem keamanan
 - b. perdagangan internasional
 - c. pariwisata internasional
 - d. migrasi internasional
4. Berikut ini terjadinya proses globalisasi melalui migrasi, *kecuali*
 - a. peperangan
 - b. bencana alam
 - c. tekanan politik
 - d. kebutuhan
5. Sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan adalah
 - a. pariwisata
 - b. media massa
 - c. disiplin
 - d. pola kerja
6. Berikut ini bidang-bidang yang menandai adanya era globalisasi, *kecuali*
 - a. ideologi
 - b. politik
 - c. sosial budaya
 - d. teknologi
7. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik, meningkatkan hubungan dan kerja sama internasional, berpartisipasi aktif dalam percaturan politik dunia merupakan sikap dalam bidang
 - a. ekonomi
 - b. politik
 - c. budaya
 - d. hukum
8. Sikap manusia untuk berhati-hati, waspada, memilih, dan memerhatikan semua perkembangan globalisasi disebut sikap
 - a. selektif
 - b. tertutup
 - c. terbuka
 - d. introspeksi

9. Berikut ini bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi, *kecuali*
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan
 - b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
 - c. meningkatkan pendidikan
 - d. meningkatkan pertahanan dan keamanan
10. Faktor penghambat yang menandai masuknya era globalisasi di antaranya adalah
 - a. suasana keterbukaan
 - b. menghargai hasil karya orang
 - c. sikap mental yang lemah
 - d. sistem mobilitas sosial terbuka
11. Sikap bangsa Indonesia di era globalisasi dalam bidang hukum adalah
 - a. mengadakan pertukaran pelajar antarnegara
 - b. menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang baik
 - c. mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional
 - d. meningkatkan pendapatan per kapita penduduk
12. Perkembangan komunikasi ditandai dengan hal-hal berikut, *kecuali*
 - a. teknologi satelit
 - b. telepon
 - c. internet
 - d. mesin tik
13. Perkembangan perekonomian ditandai dengan adanya
 - a. pasar bebas
 - b. pasar apung
 - c. pasar lokal
 - d. pasar swalayan
14. Pola hidup dan budaya mau enak atau senang saja disebut
 - a. individualisme
 - b. hedonisme
 - c. positivisme
 - d. atheisme
15. Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat adalah
 - a. mendirikan sekolah-sekolah
 - b. memberantas buta huruf
 - c. membuat swalayan
 - d. mendirikan yayasan

16. Faktor pendukung bangsa Indonesia memasuki era globalisasi adalah
 - a. sikap tertutup
 - b. mental yang lemah
 - c. sikap keterbukaan
 - d. rendah diri
17. Pendapat yang mengatakan bahwa terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antarmasyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama dikemukakan oleh
 - a. Koentjaraningrat
 - b. Selo Sumardjan
 - c. Soenarko
 - d. Max Weber
18. Bentuk kerja sama antarnegara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang pendidikan adalah
 - a. pertukaran atlet
 - b. pertukaran binatang
 - c. pertukaran pelajar
 - d. pertukaran perdagangan
19. Aspek positif untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa adalah
 - a. paham komunisme
 - b. sikap hedonisme
 - c. pengaruh radikalisme
 - d. kemandirian
20. Berikut ini usaha yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi, *kecuali*
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
 - b. meningkatkan pergaulan
 - c. meningkatkan pendidikan
 - d. meningkatkan kualitas SDM

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Meluasnya pengaruh kebudayaan ke seluruh penjuru dunia disebut
2. Suatu keadaan yang bertolak dari anggapan bahwa saat sekarang telah terjadi keadaan saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa di dunia disebut

3. Globalisasi merupakan kecenderungan untuk menyatu dengan dunia terutama dalam bidang
4. Proses globalisasi melalui migrasi dapat terjadi karena
5. Aspek-aspek positif yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan adalah
6. Ketimpangan budaya dapat terjadi karena
7. Semakin banyak partai politik, organisasi nonpemerintah, atau LSM yang menjadi sponsor kepentingan tertentu merupakan dampak globalisasi dalam bidang
8. Salah satu dampak globalisasi di bidang ekonomi adalah
9. Bukti globalisasi teknologi di bidang komunikasi adalah
10. Bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi adalah

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud globalisasi?
2. Sebutkan saluran-saluran globalisasi yang mendukung proses globalisasi!
3. Jelaskan peranan perdagangan internasional dalam proses globalisasi!
4. Sebutkan dampak globalisasi dalam bidang politik!
5. Sebutkan faktor penghambat dan pendukung bangsa Indonesia memasuki era globalisasi!

Selamat belajar!

Bab 4

Prestasi Diri

Sumber:
www.clearinghouse.dikmenum.go.id

Setiap orang mempunyai potensi diri. Dengan adanya potensi tersebut, dapat dijadikan pembelajaran untuk memperoleh kesuksesan. Melalui proses pendidikan inilah tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik dengan cara berinteraksi dengan manusia lain.

Pendahuluan

Selamat jumpa dengan bab yang keempat!

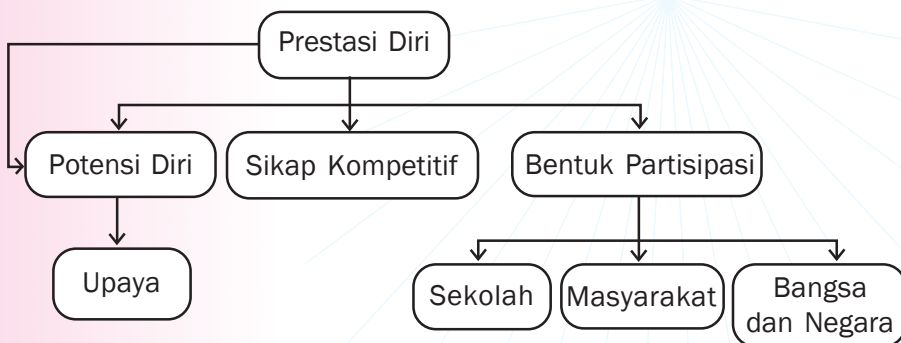
Dalam bab yang terakhir ini, kalian akan mempelajari tentang prestasi diri, yang diawali dengan pembahasan tentang potensi diri untuk berprestasi, sikap kompetitif, serta partisipasi dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri.

Tahukah kalian tentang potensi diri, sikap kompetitif, dan partisipasinya untuk mewujudkan prestasi diri? Setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian potensi diri untuk berprestasi, mampu menjelaskan sikap kompetitif, serta mampu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri.

Selain itu, kalian diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta mengamalkan prestasi diri, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Berikut ini kami sajikan peta konsep untuk memperjelas materi sehingga memudahkan kalian untuk mempelajarinya.

Peta Konsep



Berdasarkan peta konsep tersebut, materi dalam bab ini dibagi menjadi tiga subbab.

Subbab A Potensi Diri untuk Berprestasi

Subbab B Sikap Kompetitif

Subbab C Partisipasi dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri

Kami juga melengkapi soal-soal dalam setiap kegiatan belajar dengan tujuan mengulas kembali pemahaman kalian tentang materi yang dikemukakan sebelumnya.

Pelajarilah materi dalam bab ini secara bertahap kegiatan demi kegiatan. Kerjakan pula setiap tugas yang ada dalam kegiatan untuk menguji kemampuan diri kalian.

A. Potensi Diri untuk Berprestasi

Di awal perjumpaan kali ini kita akan membahas potensi diri untuk berprestasi. Setiap orang pasti memiliki potensi untuk berprestasi. Namun, tidak setiap orang memahaminya. Potensi diri yang dimiliki seseorang dapat dikembangkan untuk meraih prestasi tergantung pada individu.

Sebenarnya apakah yang dimaksud potensi diri? Bagaimana cara untuk mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi? Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari materi berikut!

1. Pengertian Potensi Diri

Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to patent* yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.

Berbagai pengertian di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.1 Pendidikan sebagai tempat untuk mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik.

Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses pembelajaran. Orang tidak dapat mewujudkan potensi diri dalam perilaku apabila potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan melalui pembelajaran.

Potensi yang dimiliki oleh manusia dapat berkembang ke arah yang baik atau tidak baik. Jika seseorang hidup di lingkungan yang tidak baik, potensinya juga akan berkembang ke arah yang tidak baik sehingga perilakunya tidak baik. Untuk mencegah

perilaku yang tidak baik, manusia memerlukan usaha yang sadar dan sistematis untuk menangkalnya. Usaha tersebut diperoleh melalui pendidikan secara formal maupun nonformal, di samping pendidikan pergaulan yang baik.

Proses pendidikan untuk mengembangkan potensi ke arah yang baik itu dilakukan melalui hubungan dengan orang lain atau interaksi sosial. Proses pendidikan tersebut memberi kita pengertian tentang wawasan pendidikan.

Wawasan pendidikan adalah cara memandang bahwa pendidikan merupakan proses pemanusiaan dan dilakukan dalam interaksi dengan manusia lain sehingga membawa akibat adanya penyebutan anak didik berubah menjadi subjek didik. Oleh karena itu, guru tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi yang tahu segalanya. Tanggung jawab pendidik adalah menyediakan dan mengatur kondisi yang memudahkan subjek didik dalam belajar.

Cara pandang dalam wawasan pendidikan sekarang sejalan dengan ajaran **Ki Hajar Dewantara**, yaitu

- a. *Ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi contoh);
- b. *Ing madya mangun karso* (di tengah membangkitkan hasrat untuk belajar);
- c. *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan).

2. Upaya untuk Berprestasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Setelah dapat mengenali potensi diri, kita berupaya untuk berprestasi. Apakah yang dimaksud dengan prestasi? Untuk itu, simaklah uraian berikut.

a. Pengertian Prestasi dan Motivasi

Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan. Pendapat lain mengatakan bahwa prestasi adalah hasil yang diperoleh seseorang dari satu periode ke periode lain yang menunjukkan adanya perubahan ke arah kemajuan. Kedua pendapat itu memiliki persamaan bahwa prestasi perlu dicapai oleh seseorang. Bedanya, pendapat yang terakhir mengatakan bahwa pencapaian seseorang dapat dikatakan berprestasi apabila ada kemajuannya.

Siswa dapat berprestasi apabila ia sudah melakukan tugas belajar. Dengan demikian, prestasi yang dijelaskan di sini adalah prestasi yang dijelaskan sebagai hasil belajar atau prestasi belajar. Misalnya, ada siswa yang cerdas,

tetapi memiliki prestasi belajar sedang. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar.

Hal-hal yang menyebabkan seorang siswa mempunyai prestasi rendah adalah

- 1) pengetahuan/keterampilan yang diperlukan tidak dikuasai;
- 2) mempunyai kemampuan yang diperlukan, tetapi tidak mau melakukannya karena berbagai sebab.



Sumber: Dokumentasi penerbit

Gambar 4.2 Motivasi merupakan faktor terpenting untuk meraih prestasi.

Dari beberapa faktor yang berpengaruh bagi prestasi, motivasi merupakan faktor yang memegang peranan penting. Motivasi ialah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan terjadinya perilaku ke arah tujuan tertentu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi terhadap sesuatu apabila perilakunya untuk menunjukkan minat, perhatian, ingin ikut serta, bekerja keras, mencurahkan waktunya untuk

hal itu, dan bekerja terus tidak berhenti sampai selesai. Siswa yang memiliki motivasi untuk berprestasi disebabkan adanya kebutuhan untuk berprestasi.

b. Berprestasi dalam Berbagai Bidang



Sumber: Dokumentasi penerbit

Gambar 4.3 Meningkatkan motivasi belajar dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi.

Prestasi dapat dicapai jika memiliki motivasi. Seseorang dikatakan memiliki motivasi apabila minat dan perhatiannya terarah pada sesuatu yang akan dicapai dan berusaha untuk melakukannya. Ia tidak akan berhenti berpikir dan bekerja sebelum tugasnya selesai dikerjakan. Oleh karena itu, siswa perlu meningkatkan motivasi belajarnya. Dengan meningkatkan motivasi belajar, siswa dapat memperoleh prestasi belajar.

Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dengan empat hal, yaitu perhatian, relevansi, percaya diri, dan kepuasan.

1) Perhatian

Perhatian seseorang muncul apabila didorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang sudah ada pada setiap orang perlu dipelihara. Rasa ingin tahu ini bertujuan untuk mencapai tujuan positif. Rasa ingin tahu dapat mendorong perhatian seseorang terhadap sesuatu yang dipelajari. Rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengajukan pertanyaan; membaca materi yang diajarkan dalam buku, dan menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya.

2) Relevansi

Relevansi dapat ditimbulkan dengan meyakinkan diri kita bahwa materi yang sedang dikaji itu bermanfaat bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Caranya dengan menanyakan tentang manfaat mempelajari materi itu, bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam menjalankan tugas di kemudian hari, dan bagaimanakah contoh yang dapat diberikan agar diperoleh pemahaman yang bermakna.

3) Percaya Diri

Percaya diri adalah perasaan yakin akan potensi yang dimiliki untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif. Percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan.

Percaya diri dapat diupayakan dengan jalan sebagai berikut.

- a) Meningkatkan pengalaman dengan jalan selalu mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai latihan untuk menambah pemahaman dan keterampilan.
- b) Belajar materi secara bertahap, bagian demi bagian tidak sekaligus.
- c) Materi yang sedang dikaji dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai.
- d) Kriteria keberhasilan ditentukan atau ditargetkan dalam bentuk besarnya prestasi yang akan diperoleh.
- e) Pengembangan rasa percaya diri dengan meyakinkan bahwa apa yang sudah dilakukan itu merupakan aktivitas yang mendukung keberhasilan.

4) Kepuasan

Kepuasan datang apabila seseorang berprestasi dan berhasil dalam mencapai tujuan. Pengalaman keberhasilan/sukses atau kegagalan mendorong seseorang untuk berbuat seperti yang pernah dilakukan dengan cara yang lebih baik dan harapan prestasi yang lebih baik pula.

3. Peluang untuk Berprestasi

Setiap orang memiliki potensi, tetapi tidak setiap orang mampu mengenali potensinya sendiri untuk kemudian didayagunakan demi kesuksesan dirinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa langkah awal untuk menuju sukses adalah dengan mengenali potensi diri kita sendiri. Jika kita mengenali apa yang mungkin menjadi kelebihan kita dibandingkan orang lain maka selanjutnya kita dapat bekerja keras untuk mengembangkannya. Setiap bakat, kegemaran, atau kebiasaan tertentu dapat saja merupakan potensi yang akan berbuah menjadi prestasi jika kita mengasah hal tersebut.

Cita-cita didefinisikan sebagai keinginan, kehendak, dan harapan yang selalu ada di dalam pikiran atau di dalam hati. Cita-cita merupakan tujuan yang akan dicapai. Seorang siswa harus mempunyai cita-cita dan rencana untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Untuk mencapai cita-cita atau berprestasi, seorang siswa harus memiliki daya pikir kritis dan kreatif, serta peluang untuk melakukan prestasi.

a. Daya Pikir Kritis dan Kreatif



Sumber: Ensiklopedia Iptek

Gambar 4.4 Sikap kreatif menjadi peluang untuk berprestasi.

Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara objektif, logis (sesuai dengan akal sehat), tidak memihak, dan tidak pandang bulu. Berpikir kritis tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dilatih. Latihan yang perlu dilakukan ialah dengan membuat keputusan dan memberikan alasan mengenai pendapat, tindakan, peraturan, atau objek lainnya.

Berpikir kreatif berarti menghasilkan suatu pemecahan masalah dan suatu alternatif sehingga masalah dapat dipecahkan dengan beberapa cara dan tidak hanya satu cara. Seseorang yang kreatif dapat menghasilkan gagasan, wawasan, pendapat, atau prestasi. Seorang berpribadi kreatif memiliki kemampuan rasional, kemampuan emosional atau perasaan berimajinasi, berfantasi, dan berintuisi.

Seorang yang berpribadi kreatif memiliki ciri-ciri, antara lain

- 1) bebas dalam berpikir dan bertindak, tidak tertarik pada hal-hal yang rutin, seragam, statis, tidak mudah terpengaruh desakan dari luar karena ia merasa benar;
- 2) cenderung memiliki sifat lentur, tidak kaku dalam pandangan hidupnya dibandingkan dengan orang yang tidak kreatif;
- 3) berkemauan untuk mengakui dorongan-dorongan dirinya yang tidak berdasarkan akal;
- 4) menyukai hal-hal yang menantang, rumit, dan baru;
- 5) memiliki rasa humor yang bagus;
- 6) berani mengemukakan pendapat dan berani mengambil risiko;
- 7) bersifat ingin tahu, selalu ingin mendapat pengalaman baru, dan memiliki banyak inisiatif.

Untuk berpikir kreatif, seseorang harus melakukannya melalui empat tahap, yaitu tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi.

- 1) Tahap persiapan merupakan tahap ketika siswa sedang mengumpulkan informasi atau bahan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah atau sedang mencari bahan.
- 2) Tahap inkubasi merupakan tahap sesudah memperoleh informasi yang diduga berkaitan dengan idenya.
- 3) Tahap iluminasi merupakan tahap timbulnya gagasan atau inspirasi baru.
- 4) Tahap verifikasi (penentuan akhir).

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif apabila ia mampu merumuskan pendapat atau mengulas pendapat orang lain dengan jelas, tepat, dan berpikiran terbuka terhadap pendapat orang lain; serta mampu menyusun suatu rencana yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu tugas.

Pembentukan pikiran kritis dan kreatif ini sering dilanjutkan dengan pembinaan keterampilan proses, meliputi kemampuan berpikir kritis dan kreatif dengan cara belajar yang berpusat pada anak.

b. Peluang untuk Mewujudkan Prestasi



Sumber: www.seamolec.or.id

Gambar 4.5 Kegiatan berdiskusi merupakan salah satu peluang untuk berprestasi.

Dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang untuk membina kemampuan berpikir, siswa makin memiliki keterampilan untuk mengemukakan pendapat, merumuskan pendapat, mengajukan pendapat dengan sopan, dan menjaga etika berdiskusi sehingga siswa tidak akan canggung berhadapan dengan orang lain, tetapi sopan dan berkepal dingin dalam menerima kritik.

Peluang-peluang untuk berprestasi hanya dapat diperoleh dengan cara aktif ikut serta dalam kegiatan berdiskusi atau menyusun karangan ilmiah. Siswa harus mempunyai kesadaran bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu merupakan latihan untuk masa depan.

Dari sejumlah potensi yang ada pada setiap diri manusia tersebut, sesungguhnya dapat diberdayakan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbagai peluang untuk mewujudkan prestasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam berbagai bidang kehidupan bukanlah sesuatu yang kebetulan atau apa adanya. Sebuah prestasi dalam bidang apapun harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik dan profesional. Jadi, upaya untuk berprestasi merupakan optimalisasi pemberdayaan dan pengembangan potensi diri yang terus-menerus dan sungguh-sungguh.

Setelah mempelajari materi dengan baik. Ujilah kemampuan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas berikut dengan sebaik-baiknya. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, diskusikan dengan teman kalian!



Uji Kompetensi

1. Diskusikan bersama teman sebangku!

Buatlah pengertian tentang potensi diri sesuai pendapatmu dan teman sebangkumu! Kemudian, simpulkan kedua pendapat tersebut!

No.	Nama	Pendapat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

2. Sebagai manusia, kita dapat berprestasi di mana saja dan kapan saja. Datanglah ke kantor guru atau kepala sekolah kalian! Tanyakan selama satu tahun prestasi yang diraih siswa di sekolah kalian!

No.	Nama	Cabang Olahraga	Prestasi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

3. Tuliskan beberapa tindakan yang akan kalian lakukan jika mendapat peluang berikut ini. Kerjakan pada kolom yang tersedia.
- Mewakili sekolah dalam perlombaan murid teladan.
 - Mewakili sekolah mengikuti pelatihan OSIS.

No.	Peluang	Tindakan
1.	Perlombaan murid teladan	_____

2.	Pelatihan OSIS	_____

4. Carilah buku-buku biografi di perpustakaan kalian mengenai tokoh yang berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemudian buatlah dengan pengembangan potensi diri!
5. Berilah contoh berbagai kegiatan untuk mewujudkan prestasi dalam berbagai bidang kehidupan dalam tabel berikut!

No.	Bidang	Contoh
1.	Politik	_____

2.	Ekonomi	_____

3.	Sosial budaya	_____

4.	Hukum	_____

5.	Pertahanan dan Keamanan	_____

B. Sikap Kompetitif

Setelah kalian mempelajari dan memahami pentingnya potensi diri serta segala upaya untuk mewujudkan prestasi dalam berbagai bidang kehidupan, pembahasan selanjutnya mengenai pentingnya sikap kompetitif untuk meraih kesuksesan.

Sebagaimana kalian ketahui, sikap kompetitif merupakan wujud dari kesiapan untuk bereaksi dengan cara tertentu. Dengan adanya sikap kompetitif diharapkan seseorang dapat bersaing secara positif dengan segala potensi yang dimilikinya.

Sikap kompetitif didefinisikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu. Seseorang dapat memiliki sikap berkompetisi atau tidak memiliki sikap tersebut dapat diduga dari respons terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya. Dengan diberikan rangsangan berupa pertanyaan, seseorang baru mereaksi, merespons, atau menanggapi dengan jawaban yang menggambarkan kesiapan untuk ikut berkompetisi.

Apakah seseorang yang sudah menyatakan sikapnya untuk ikut berkompetisi pasti melaksanakannya dalam bentuk perbuatan kompetisi?

Seseorang dikatakan memiliki sikap untuk siap berkompetisi apabila ia memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. pengetahuan yang cukup tentang perlunya kompetisi;
2. cara-cara dengan akal sehat bahwa upayanya akan berhasil;
3. perhitungan akibat setiap langkah perilakunya dan mengupayakan kerugian yang seminimal mungkin;
4. pernah mempunyai pengalaman tentang perbuatan yang akan dilakukan sehingga akan semakin hati-hati.

Kualitas manusia Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian, manusia Indonesia perlu dibekali sifat-sifat, antara lain sebagai berikut:

1. pendirian yang teguh;
2. keberanian mengambil risiko;
3. kedisiplinan;
4. dinamis dan berkemauan keras;
5. cinta pada tugas;
6. loyal (setia) pada bangsa dan negara;
7. tekad yang kuat;
8. bertanggung jawab.

Kita dapat belajar banyak dari kisah sukses orang-orang ternama. Ada satu hal yang menjadi kesamaan di antara orang-orang ternama, yaitu mereka tidak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir dari semuanya. Mereka memiliki kemungkinan (gagal atau sukses). Oleh karena itu, ada satu hal penting yang patut kita pahami dalam upaya untuk meraih prestasi, yaitu berani mengambil risiko.

Orang yang berani mengambil risiko tidak takut untuk mencoba. Mungkinkah kamu dapat mengendarai sepeda, jika kamu tidak pernah berani untuk mencoba bersepeda? Saat pertama mengendarai sepeda, ada kemungkinan kita akan terjatuh atau menabrak. Akan tetapi, dari situ kita kemudian belajar untuk berhati-hati dan akhirnya dapat bersepeda dengan baik. Demikian pula dalam kehidupan nyata, kita harus berani untuk mencoba dan bercermin dari kegagalan. Kemudian kita berusaha lebih baik dan lebih keras sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.

Dalam mencapai kesuksesan yang diinginkan, **A.A. Qowiy** memberikan kiat-kiat menghadapi kesulitan hidup menjadi berprestasi melalui sepuluh sikap positif sebagai berikut:

1. tegar menghadapi kesulitan;
2. mengambil hikmah kesulitan;
3. gigih mencari ilmu;
4. berani mengambil risiko;
5. tenang dalam bertindak;
6. membiasakan diri bekerja keras;
7. menikmati indahnya kesulitan;
8. menjalin kerja sama saling menguntungkan;
9. tekun berdoa kepada Tuhan;
10. mengembangkan sikap tawakal.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam meraih kesuksesan seseorang harus memiliki sikap kompetitif. Dengan adanya sikap kompetitif diharapkan kesuksesan dapat diraih dengan mudah.

Setelah kalian mempelajari dan memahami materi di atas, tentunya kalian paham apa yang telah diuraikan. Untuk itu, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut untuk menguji kemampuan dalam memahami materi di atas!



Uji Kompetensi

1. Sebutkan beberapa sikap positif untuk meraih prestasi! Tulislah pada kolom berikut ini!

No.	Sikap Positif untuk Meraih Prestasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian upaya yang harus dilakukan untuk berprestasi dalam berbagai bidang! Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Upaya untuk Meraih Prestasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

C. Partisipasi dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri

Partisipasi diartikan sebagai hal yang turut berperan serta dalam kegiatan, keikutsertaan, peran serta, dan keterlibatan. Dengan demikian, orang yang berpartisipasi adalah orang yang turut berperan serta atau ikut serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi yang diberikan dapat berupa, pikiran, harta benda, keterampilan, dan tenaga.

1. Wujud Partisipasi

Seseorang dianggap berprestasi jika dia telah meraih sesuatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, maupun berolahraga. Prestasi tersebut merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Sudah tentu prestasi dapat diraih setelah seseorang mengerahkan daya dan upaya, baik mencakup kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan ketahanan diri dalam berbagai bidang kehidupan.

Orang yang berprestasi adalah orang yang dianggap sukses dalam bidang tertentu, karena pada kenyataannya ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Konsep diri yang melekat pada orang yang berprestasi adalah konsep diri positif yang mampu menangkap, mengolah, dan memberdayakan diri secara rasional dan proporsional serta efektif dan efisien.

Patut dipahami bahwa prestasi bukanlah suatu yang datang tanpa usaha keras. Jika kita menyimak kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang yang berprestasi, kita akan mengetahui bahwa mereka bekerja keras untuk mencapai prestasi tersebut. Para atlet tingkat dunia telah mulai mengenal olahraga dan berlatih sejak usia belasan atau bahkan sejak masih sekolah dasar. Ilmuwan-ilmuwan besar merupakan orang-orang yang tekun belajar dan bereksperimen di antara ribuan kali eksperimen, mungkin ada berkali-kali kegagalan yang tidak membuat mereka putus asa. Kerja keras dan jiwa besar semacam itulah yang akhirnya berbuah prestasi masa datang.

Banyak orang yang menghubungkan prestasi dengan berbagai penghargaan. Sesungguhnya penghargaan hanya merupakan simbol pengakuan masyarakat terhadap suatu prestasi. Penghargaan semacam itu bentuknya bermacam-macam. Mulai dari piagam, piala, medali, hingga uang. Hal yang paling bermakna bagi seseorang yang berprestasi

sebenarnya adalah pengakuan itu sendiri, yaitu bahwa kerja keras yang dilakukannya selama ini dan hasil yang telah dicapai melalui upaya tersebut nyata memperoleh pengakuan dari masyarakat.

Partisipasi dapat berlangsung di berbagai lingkungan kehidupan, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kenegaraan, bahkan lingkungan internasional. Kita dapat berpartisipasi di berbagai lingkungan.

Berpartisipasi berarti menunjukkan ada semangat untuk berprestasi di lingkungan tempat tinggal kita. Partisipasi kita dalam berbagai aktivitas menjadi sarana bagi kita untuk meraih prestasi. Partisipasi dalam berbagai aktivitas, misalnya sebagai berikut.

a. Partisipasi di Sekolah

Wujud partisipasi di lingkungan sekolah dapat dikembangkan melalui kegiatan OSIS atau organisasi ekstra sekolah lainnya atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ikut serta dalam lomba menyanyi atau olahraga antarsekolah, mengikuti kegiatan olimpiade sekolah.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.6 Mengikut kegiatan OSIS merupakan wujud partisipasi di sekolah.

b. Partisipasi di Masyarakat

Wujud partisipasi di lingkungan masyarakat meliputi

- 1) menjadi pengurus organisasi remaja;
- 2) mengikuti lomba kebersihan kampung;
- 3) menjadi duta masyarakat;
- 4) ikut serta dalam lomba antardesa.

c. Partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Wujud partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain

- 1) ikut serta dalam pemilihan umum;
- 2) taat pada hukum dan peraturan yang berlaku;
- 3) memelihara dan mengawasi hasil pembangunan;
- 4) ikut dalam penanggulangan bencana.

Dengan adanya partisipasi dalam berbagai lingkungan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa semangat untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka mewujudkan prestasi.

2. Sikap Positif untuk Berprestasi

Konsep diri positif merupakan cara berpikir dan olah diri seseorang yang berpengaruh besar dalam proses meraih prestasi. Menurut **John Robert Power**, diri kita adalah *people who make things happening* (pelaku yang mampu mewujudkan sesuatu). Kita memang tidak menutup kenyataan bahwa seseorang tidak mungkin meraih sukses tanpa bantuan pihak lain. Namun, di antara semua faktor, hal yang paling utama adalah diri kita sendiri. Tanpa sikap positif, kita tidak akan pernah merasa yakin bahwa kita mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Jika kita tidak memiliki keyakinan, prestasi akan tampak sebagai sesuatu yang jauh dari jangkauan dan bahkan mustahil untuk diwujudkan.

Untuk dapat menjadi seorang yang sukses, kita tidak boleh mudah menyerah dan tidak pula begitu saja membiarkan perasaan putus asa atau pesimistis menghalangi kita. Menjalani hidup dengan penuh optimistis, kepercayaan diri, dan selalu merasa tertantang dengan berbagai kesulitan akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas.

Jika kita menengok sejarah, sesungguhnya kisah sukses berbagai tokoh banyak pula diwarnai dengan berbagai hambatan. Para ilmuwan harus melalui serangkaian percobaan dan kegagalan sebelum menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Seniman-seniman termasyur pada awal kariernya mungkin harus menghadapi cacian orang yang menganggap karya mereka tidak bermutu. Sementara para atlet pemecah rekor sering kali mesti bercermin dari berbagai kekalahan terdahulu saat mereka mulai meniti prestasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam berbagai aktivitas di berbagai lingkungan menjadi sarana untuk meraih prestasi. Dalam meraih prestasi diperlukan sikap mandiri, yang meliputi bekerja keras, produktif, rajin, ulet dan bersahaja. Dengan memiliki nilai-nilai dan sikap tersebut, seseorang dapat memperoleh kesuksesan.

Setelah mempelajari materi di atas, diharapkan kalian dapat mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri kalian masing-masing untuk membangun bangsa.



- | No. | Bentuk Partispasi | Bukti Pelaksanaan |
|-----|-------------------|-------------------|
| 1. | sekolah | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| 2. | masyarakat | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| 3. | bangsa dan negara | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |
| | | _____ |

- | No. | Faktor Pendorong | Penjelasan |
|-----|------------------|------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

3. Di suatu daerah sedang mengalami musibah gempa bumi. Dalam musibah tersebut banyak sekali korban yang luka-luka ataupun meninggal dunia. Mereka membutuhkan bantuan. Banyak orang yang tergerak hati untuk membantu mereka. Namun, ada oknum tertentu yang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempatan. Bagaimana pendapat kalian dengan adanya masalah tersebut! Bagaimanakah pula bentuk partisipasi kalian dalam menangani masalah tersebut!
4. Sebutkanlah hambatan-hambatan yang timbul dalam diri seseorang dalam meraih prestasi! Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka meraih prestasi?

No.	Hambatan	Cara mengatasi
1.		
2.		
3.		

5. Sebutkan manfaat kegiatan yang dilakukan dengan kompetisi sehat dan berilah contohnya!

No.	Manfaat	Contoh
1.		
2.		
3.		

Penutup

Kalian telah menyelesaikan bab keempat tentang prestasi diri dengan baik. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki pengetahuan tentang potensi diri serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan yang telah kalian peroleh ini kurang bermakna jika tidak ditindaklanjuti dengan pengamalannya. Oleh karena itu, cobalah hayati benar tentang makna prestasi diri kalian agar dapat dikembangkan dengan baik.

Rangkuman

1. Seseorang tidak dapat mewujudkan potensi dirinya dalam perilaku apabila potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan melalui pembelajaran.
2. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar agar memperoleh prestasi belajar yang tinggi dapat dilakukan dengan perhatian, relevansi, percaya diri, serta kepuasan.
3. Untuk mencapai cita-cita atau prestasi, seseorang harus memiliki daya pikir kritis dan kreatif, serta peluang untuk melakukan prestasi.
4. Seseorang dikatakan memiliki sikap untuk siap berkompetisi jika memiliki pengetahuan tentang kompetisi, menggunakan akal sehat, memperhitungkan akibatnya serta berpengalaman.
5. Partisipasi dalam berbagai aktivitas baik di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sarana bagi kita untuk meraih prestasi.

Kata Kunci



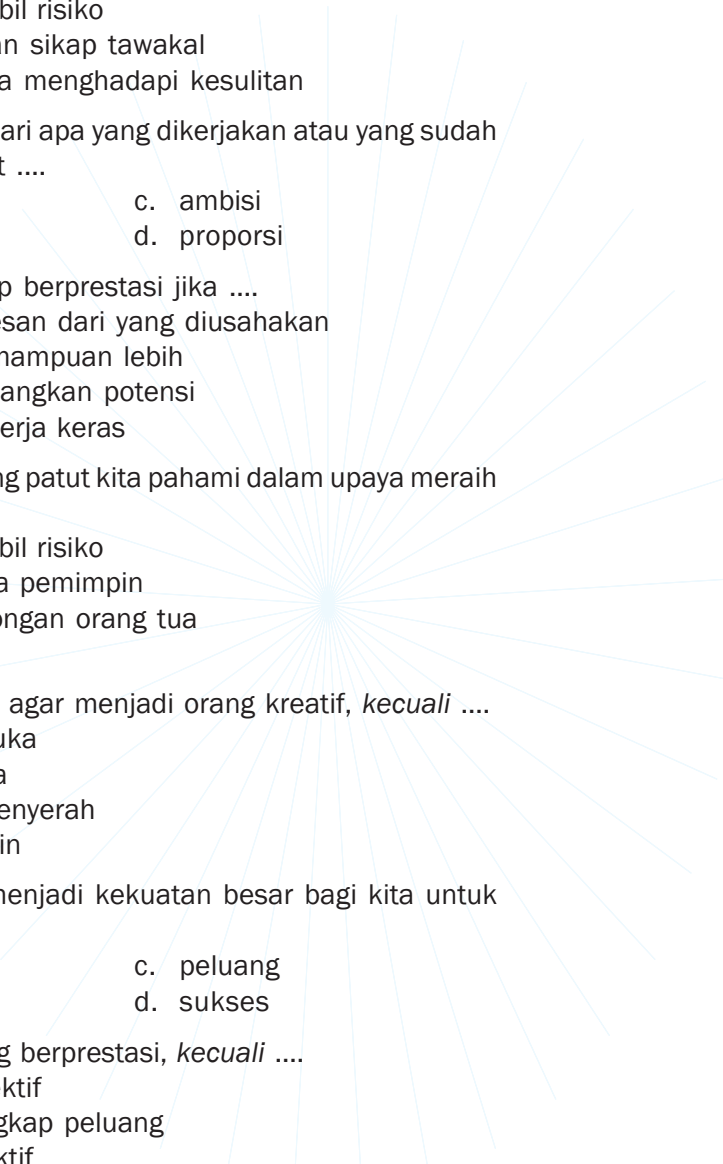
kompetitif	percaya diri
kreatif	perhatian
motivasi	potensi diri
partisipasi	prestasi

Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kerjakan tugas yang telah ada. Jika telah selesai, periksalah pekerjaan kalian bersama teman atau guru. Jika kalian mendapatkan kesulitan diharapkan bertanya kepada guru dan disarankan untuk membaca buku dari sumber lain.

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Salah satu ciri yang menonjol dari seseorang yang sukses atau berprestasi adalah
 - a. tidak putus asa dan akan membiarkan jiwanya selalu berpetualang
 - b. selalu optimis dan memimpikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal
 - c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung
 - d. berani mengambil risiko dan tidak akan membiarkan perasaan putus asa
2. Agar hidup kita kelak dapat berprestasi dengan baik, sejak dini haruslah
 - a. dibiasakan untuk belajar sesuai dengan anjuran guru
 - b. direncanakan dengan sistematis dan proporsional
 - c. selalu diikutsertakan dalam berbagai kompetisi yang ada
 - d. dilatih dalam berbagai keterampilan yang disukainya
3. Kepribadian manusia yang terbentuk berdasarkan bawaan lahir atau bakat disebut
 - a. *nurture*
 - b. *natur*
 - c. watak
 - d. karakter
4. Sikap atau perilaku yang dapat menghambat pengembangan potensi diri yang berasal dari individu sendiri, *kecuali*
 - a. berprasangka negatif
 - b. tidak memiliki tujuan jelas
 - c. keengganan mengenal diri sendiri
 - d. pendidikan yang dianut
5. Ciri-ciri perilaku manusia antara lain menghindari risiko, tidak belajar dari kesalahan, dan puas dengan kedudukan yang ada disebut
 - a. wibawa rendah
 - b. pribadi yang kerdil
 - c. kreativitas yang rendah
 - d. kemampuan lebih rendah
6. Orang yang sukses di bidang tertentu karena memiliki berbagai kelebihan disebut
 - a. berkarir
 - b. berkarya
 - c. berpotensi
 - d. berapresiasi

- 
7. Berikut ini termasuk kiat-kiat menghadapi kesulitan hidup untuk berprestasi, *kecuali*
 - a. membiasakan diri bekerja keras
 - b. berani mengambil risiko
 - c. mengembangkan sikap tawakal
 - d. menyerah ketika menghadapi kesulitan
 8. Hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan disebut
 - a. potensi
 - b. prestasi
 - c. ambisi
 - d. proporsi
 9. Seseorang dianggap berprestasi jika
 - a. meraih kesuksesan dari yang diusahakan
 - b. mempunyai kemampuan lebih
 - c. telah mengembangkan potensi
 - d. ingin selalu bekerja keras
 10. Satu hal penting yang patut kita pahami dalam upaya meraih prestasi adalah
 - a. berani mengambil risiko
 - b. tergantung pada pemimpin
 - c. tergantung dorongan orang tua
 - d. selalu berdoa
 11. Jaminan seseorang agar menjadi orang kreatif, *kecuali*
 - a. berpikiran terbuka
 - b. berani mencoba
 - c. tidak mudah menyerah
 - d. meniru orang lain
 12. Kreativitas dapat menjadi kekuatan besar bagi kita untuk meraih
 - a. keuntungan
 - b. prestasi
 - c. peluang
 - d. sukses
 13. Berikut ini ciri orang berprestasi, *kecuali*
 - a. bertindak subjektif
 - b. mampu menangkap peluang
 - c. efisien dan efektif
 - d. bertindak rasional
 14. Menjadi pengusaha sukses yang mampu memberikan devisa bagi negara dan menyerap banyak tenaga kerja merupakan wujud prestasi dalam bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial
 - d. budaya

15. Melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak dan keadilan sampai dengan tuntutananya terpenuhi merupakan wujud prestasi bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial dan budaya
 - d. hukum, pertahanan dan keamanan
16. Mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Pernyataan tersebut dalam pembangunan nasional tercakup dalam asas
 - a. demokrasi Pancasila
 - b. adil dan manfaat
 - c. kemandirian
 - d. kejuangan
17. Untuk mengantarkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya seharusnya kita bersikap
 - a. menerima semua kemajuan teknologi
 - b. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
 - c. belajar dari pengalaman masa lampau
 - d. menerima segala bantuan dari bangsa lain
18. Partisipasi siswa dalam mewujudkan cita-cita perjuangan pahlawan adalah
 - a. mengadakan peringatan hari pahlawan di sekolah
 - b. memberikan sumbangan kepada keluarga para pahlawan
 - c. rajin belajar agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa
 - d. mendoakan arwah para pahlawan agar diampuni Tuhan
19. Dalam pembangunan, pembinaan, dan pengembangan, pemuda diupayakan untuk
 - a. bertanggung jawab, idealis, dan individualis
 - b. berjiwa patriot, demokratis, dan individualis
 - c. mandiri, idealisme yang kuat, dan demokratis
 - d. mempunyai rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan dalam pembangunan
20. Keikutsertaan siswa dalam pembangunan nasional ialah
 - a. bercita-cita menjadi orang yang berjasa
 - b. belajar dengan tekun
 - c. bekerja dengan semangat
 - d. membantu orang tua

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan
2. Empat kondisi motivasional terdiri atas
3. Untuk dapat meraih prestasi kita harus bersikap
4. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah
5. Pengertian kreativitas adalah
6. Proses pemikiran kreatif dilakukan melalui empat tahap, yaitu
7. Ciri-ciri seorang yang mempunyai pribadi kreatif adalah
8. Menjadi duta seni budaya komersial dan pertukaran pelajar karena telah memiliki sejumlah keahlian wujud prestasi di bidang
9. Sebagai alat negara yang mampu menciptakan rasa aman dan tertib merupakan wujud dari prestasi bidang
10. Cara menumbuhkan sikap percaya diri adalah

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud potensi diri?
2. Apakah yang dimaksud sikap kompetitif?
3. Bagaimanakah cara seorang siswa untuk berprestasi?
4. Bagaimanakah cara menumbuhkan potensi diri dalam diri seseorang?
5. Jelaskan hubungan antara potensi diri dan prestasi!

Selamat belajar!

Ulangan Semester II

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Deskripsikan secara singkat proses globalisasi!
3. Sebutkan aspek-aspek negatif dari globalisasi!
4. Jelaskan secara singkat peranan politik luar negeri Indonesia!
5. Sebutkan tugas perwakilan diplomatik!
6. Sebutkan peran serta Indonesia di dunia internasional!
7. Sebut faktor penghambat dan pendukung bangsa Indonesia memasuki era globalisasi!
8. Apakah yang dimaksud dengan potensi diri?
9. Apakah hubungan motivasi dan prestasi?
10. Berilah contoh sikap kompetitif!
11. Sebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar!
12. Salah satu peluang untuk berprestasi adalah memiliki daya pikir kritis dan kreatif. Apa maksud pernyataan tersebut?
13. Sebutkan peluang yang dapat dilakukan dalam bidang seni budaya!
14. Sebutkan kiat-kiat dalam mencapai kesuksesan menurut A.A. Qowiy!
15. Sebutkan wujud partisipasi dalam berbagai aktivitas!

B. Bacalah informasi di bawah ini dengan saksama!

Bu Antin senang anak-anaknya mau belajar komputer sejak dini. Silva (10), anak pertamanya, tak hanya senang bermain *games* namun juga lancar mengoperasikan berbagai program pengolahan kata dan angka. Silva kini pandai dalam pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris lantaran sering bermain komputer.

Pengalaman Ibu Bambang berbeda dengan pengalaman Bu Antin. Bu Bambang justru merasa mempunyai masalah seputar keakraban anaknya dengan komputer. Menurutny, Agus (12) kini lebih suka menghabiskan waktunya berjam-jam di hadapan komputer hanya untuk bermain *games*.

Anak laki-lakinya itu juga malas jika diajak belajar untuk mengoperasikan berbagai program pembelajaran, seperti pengolahan kata atau angka. Bahkan ada kekhawatiran ketika

anaknya melakukan *browsing* untuk mencari games online di internet. Secara tidak sengaja muncul *banners* yang berbau pornografi dan perjudian.

Kedua contoh tersebut merupakan permasalahan dilematis yang sering dihadapi orang tua berkaitan dengan dampak teknologi komputer dan internet saat ini.

Beberapa pakar mengatakan kemunculan teknologi komputer dan internet sendiri sesungguhnya bersifat netral. Pengaruh positif atau negatif yang bisa muncul dari alat ini tentu saja lebih banyak bergantung pada pemanfaatannya. Jika anak-anak dibiarkan menggunakan komputer secara sembarangan, pengaruhnya bisa jadi negatif. Sebaliknya, komputer akan memberikan pengaruh positif jika digunakan dengan bijaksana, yaitu membantu pengembangan intelektual dan motorik anak.

Sisi negatif penggunaan komputer tak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kemungkinan tanpa sepengetahuan orang tua, anak bermain *games* yang menonjolkan unsur-unsur seperti kekerasan dan agresivitas.

Berbagai studi juga telah mengidentifikasi masalah dan persoalan yang muncul sebagai akibat keterlibatan dalam pemanfaatan *games* pada komputer dan dunia maya. Di antaranya dapat menjadi ketergantungan, merusak hubungan keluarga dan sosial, menimbulkan keterasingan dari realitas, rusaknya disiplin kehidupan, dan pengabaian tugas utama seperti belajar.

Setelah membaca dan memahami wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Sebutkan dampak negatif penggunaan komputer bagi anak-anak!
2. Sebutkan dampak positif penggunaan komputer bagi anak-anak!
3. Sebutkan pengaruh positif kemunculan teknologi komputer!
4. Bagaimanakah peranan orang tua terhadap penggunaan komputer bagi anak-anak!
5. Diskusikan dengan kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan terhadap adanya dampak globalisasi?

Glosarium

daerah otonom

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dekonsentrasi

pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

desentralisasi

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

diplomati

berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dan negara.

globalisasi

proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

guncangan budaya

gerakan (goyangan) budaya yang kuat.

hedonisme

pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

individualisme

paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.

interdependensi

saling tergantung.

kebijakan publik

keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

kompetitif

berhubungan dengan kompetisi (persaingan) bersifat kompetisi.

kreatif

memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan.

konsul

orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warganegara di negara lain.

konsumerisme

paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan.

masyarakat madani

masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bekerja secara damai.

motivasi

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk suatu tindakan dengan tujuan tertentu.

otonomi daerah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

otonomi luas

daerah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas, hampir di semua bidang pemerintahan, kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat.

permitif

bersikap terbuka (serba membolehkan; suka mengizinkan).

politik

pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).

potensi diri

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan

pragmatis

bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kemanfaatan.

sentralisasi

penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat.

Indeks

A

AA Qowiy 119
asas perbantuan 41, 63
atase 81, 83

B

bela negara 1, 14, 15, 16, 27, 31, 32, 34

C

cita-cita 3, 24, 31, 35, 50, 113, 126, 129
conditio sine quanon 25

D

de facto 5, 6
de jure 5, 6, 32
dekonsentrasi 41, 43, 44, 63, 133
demokrasi 12, 13, 17, 33, 39, 40, 44, 49, 60, 65, 98, 103, 104,
129, 137
demonstrasi 86
desentralisasi 11, 39, 41, 43, 63, 64, 133
duta besar 81, 83

H

Harold J. Laski 3

I

ideologi 10, 13, 19, 20, 23, 25, 34, 75, 77, 94, 97, 99, 101, 103
internet 74, 88, 92, 101, 104, 132

J

Jean Bodin 3
John Robert Power 123

K

Ki Hajar Dewantara 110
koloni 7, 11, 13, 32, 33
konfederasi 11
konflik 27, 85
konsul 84, 102, 134
kreatif 99, 113, 114, 115, 126, 128, 130, 131, 134

L

lembaga swadaya masyarakat 87
liberal 10, 13

M

Max Weber 3, 32, 105
monarki 12, 13, 33
Mr. Soenarko 3

N

nasionalisme 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 61
nepotisme 61, 62

O

oligarki 12, 13, 33
otonomi 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 134

P

patriotisme 24, 25, 26, 30, 32, 34, 35
PBB 12, 33, 85
perwakilan 11, 44, 45, 64, 81, 82, 83, 84, 86, 131
primordial 25
protektorat 11, 32

R

Roger H. Soltau 10, 13, 32
Rousseau 10

S

Selo Sumardjan 74, 105
sosialis 10
sumber daya alam 22, 60, 77, 78
supremasi hukum 87, 88

T

Tentara Nasional Indonesia 15, 16, 20, 21

Daftar Pustaka

- Asian Develepment Bank. 1998. *Kebijakan Anti Korupsi*. Jakarta: ADB.
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Tata Urut Perundang-Undangan dan Problema Peraturan Daerah*. Jakarta: LP3HET.
- A.S. Hikam, Muhammad. 2005. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Baleg DPR.
- Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chandra, Gregorius. 2004. *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djuroto, Totok dan Bambang Supriyadi. 2002. *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faturohman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM.
- Giddens, Anthoni. 2001. *Runway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Haricahyono. 1986. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kamal Pasha, Musthafa. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Kansil, C.S.T. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1994. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. *UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jakarta: Setneg RI.
- Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Rahman, Syaiful. 2004. *Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam Era Reformasi*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seri Pustaka Yustisia. 2005. *Hukum Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

_____. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara*.

_____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*.

Zaelani Sukaya, Endang, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.



ISBN 979-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-068-164-4

**Buku ini telah dinilai oleh BSNP
dan dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran
berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2007
Tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku
Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan
untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.535,-